



**DINAS KEHUTANAN
PROV. SULAWESI SELATAN**

**Rencana
Kerja
Perubahan**

2022

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mengizinkan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 sehingga dapat tersusun.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan tahun 2022, serta memperhatikan isu kehutanan yang menjadi kebutuhan masyarakat sebagai langkah pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid 19.

Terdapat empat sasaran pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2022 yaitu meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan, meningkatkan kontribusi kehutanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan, meningkatnya akses legal masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial dan konservasi sumberdaya alam hayati, terjaganya fungsi dan legalitas kawasan hutan, sehingga diharapkan rencana kerja ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen penganggaran perubahan (Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan) pada tahun 2022 agar sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dapat terwujud

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan saran dan masukan, sehingga Rencana Kerja Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022, tersusun dengan baik.

Makassar, Agustus 2022

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Sulawesi Selatan

Ir. H. ANDI PARENRENGI, M.P
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP.19631231 199703 1020

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Diagram	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	6
2.1 Evaluasi Renja Dinas Kehutanan Prov. Sulsel tahun 2020	6
2.2 Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	36
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD	37
BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan	54
BAB IV Penutup	68
5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan	68
5.2 Rencana tindak lanjut	68s

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Target dan realisasi tujuan dan sasaran tahun 2021	7
Tabel 2	Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022 Triwulan II (TC-29).....	8
Tabel 3	Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kehutanan Prov. Sulsel (TC-30).....	26
Tabel 4	Review terhadap r Perubahan RKPD tahun 2022 (TC-31)	38
Tabel 5	Perubahan Prioritas, Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2021	50
Tabel 6	Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan	55

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1	Perkembangan perhutanan sosial tahun 2022	27
Diagram 2	Kelompok tani hutan tahun 2022.....	28
Diagram 3	Pelibatan masyarakat pada perhutanan sosial tahun 2022	29
Diagram 4	Penyuluh kehutanan, local champion, PKSM tahun 2022	30
Diagram 5	Polisi kehutanan.....	31
Diagram 6	Kerusakan kawasan hutan	32
Diagram 7	Rehabilitasi Hutan dan Lahan.....	33
Diagram 8	Kontribusi PDRB Sektor Kehutanan	34
Diagram 9	Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan.....	35
Diagram 10	Luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Selatan	36



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah identik dengan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki dalam rangka pemenuhan kebutuhan layanan dasar masyarakat dan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dalam aspek pendapatan kesempatan kerja, akses pengambilan kebijakan. Mewujudkan hal tersebut diperlukan perencanaan yang logis, rasional, komprehensif dan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Perencanaan yang sistematis akan memberi acuan yang jelas dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Rencana Kerja Perubahan Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan strategis tahunan sektor kehutanan pada tahun 2022, yang memuat perubahan kebijakan anggaran daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan pengurangan anggaran program dan kegiatan. Dokumen Rencana Kerja Perubahan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pasal 15 dan disusun melalui koordinasi, sinergitas dengan pemangku kepentingan untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan.

Perubahan rencana kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, serta dinamika kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam percepatan pemulihan ekonomi dan sosial serta dampak pandemi Covid 19.

Rencana Kerja Perubahan tahun 2022 merupakan penjabaran tahun ketiga Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023. Beberapa program strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan menjadi bagian dalam pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, dengan demikian dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2021 sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.



RKPD perubahan tahun 2022 menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022, serta memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada RKPD Pokok Tahun 2022, maupun untuk menampung perubahan belanja prioritas dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022.

Oleh karena itu, Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan yang dibuat dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2022 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028.
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri dalam negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 62 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 92 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi Selatan
18. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional



19. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 disusun dengan maksud untuk sebagai pedoman dan acuan sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam rangka mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
2. Tujuan
 - a. Menetapkan program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai melalui APBD Provinsi maupun melalui DAK tahun 2022
 - b. Acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022
 - c. Sebagai tolok ukur penilaian/evaluasi Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai Triwulan II

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

Bab III. Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini memuat indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat



Bab IV. Penutup

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Rencana Kerja Perubahan serta kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 TRIWULAN II

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai. Pertimbangan dan arahan masukan terhadap pencapaian program kerja untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang sekaligus penentuan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi rencana kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 Triwulan II sebagai berikut :

2.1 Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 Triwulan II

Sesuai dengan rencana strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, tujuan dan sasaran pembangunan kehutanan yang akan dicapai meliputi :

1. Tujuan 1 : Mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan
 - Sasaran 1.1 : Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan
 - Sasaran 1.2 : Meningkatnya kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi
 - Sasaran 1.3 : Meningkatnya akses legal masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial dan konservasi sumberdaya alam hayati
 - Sasaran 1.4 : Terjaganya fungsi dan legalitas kawasan hutan
2. Tujuan 2 : Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah
 - Sasaran 2.1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan, dan pengelolaan keuangan perangkat daerah

Target dan realisasi tujuan dan sasaran pada tahun 2021 sesuai rencana kerja tahun 2021, tersaji pada tabel berikut :



Tabel 1

Target dan realisasi tujuan dan sasaran sampai dengan tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target tahun 2021	Realisasi tahun 2021
1. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan		Luas pengelolaan kawasan hutan kewenangan provinsi	1.780.029 ha	1.780.029 ha
	1.1 Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	58,66	55,40
	1.2 Meningkatnya kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase kontribusi PDRB kehutanan terhadap PDRB Sulsel	0,07	0,06
		Luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi	12.000 ha	48.639,26 ha
	1.3 Meningkatnya akses legal masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial dan konservasi sumberdaya alam hayati	Persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi	7,89 %	9,88 %
		Persentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata	15 %	14,49 %
	1.4 Terjaganya fungsi dan legalitas kawasan hutan	Persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	64,67 %	68,20 %
		Jumlah kesatuan pengelolaan hutan	24 KPH	16 KPH
2. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah		Tingkat akuntabilitas kinerja	75	75,93
	2.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai Sakip OPD	75	75,93
		Persentase ASN nilai Sakip kategori Baik	90 %	95,58 %
		Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)	90 %	98,19 %
		Persentase temuan material	5 %	3,9 %

Pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2021 di dilaksanakan melalui 5 (lima) program dan 14 (empat belas) kegiatan, dan 28 sub kegiatan dengan uraian sebagaimana pada tabel berikut ;



Tabel TC-29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Triwulan II

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 Triwulan II			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pilihan									
	Bidang Kehutanan									
	Program Pengelolaan Hutan	Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi	65,47 %	57,91 %	61,60 %	0 %	0 %	65,47 %	65,61 %	
		Persentase kerusakan kawasan hutan per tahun	14,82 %	17,59 %	16,2 %	0 %	0 %	14,82 %	0,08 %	
		Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan	92.336,63 m ³	92.336,63 m ³	92.336,63 m ³	75.108,9623 m ³	81,99 %	92.336,63 m ³	134.211,35 m ³	
		Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu	283 ton	283 ton	283 ton	571,319 ton	201 %	283 ton	18.423,14 ton	
	Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan KPH Kewenangan Provinsi	Luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	1.780.029 ha	1.780.029 ha	1.780.029 ha	646,58 ha	0,03%	1.780.029 ha	1.780.029 ha	
	- Penyusunan rancang bangun tata hutan wilayah KPH	Jumlah dokumen rancang bangun KPH	11 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	0 dokumen	0 %	2 dokumen	0 dokumen	
	- Pembagian blok/petak pengelolaan hutan KPH	Jumlah patok batas blok dan petak	748 buah	0 buah	748 buah	0 buah	0 %	748 buah	0 buah	
		Panjang penataan batas blok dan petak	150 km	0 km	150 km	0 km	0 %	150 km	0 km	
	- Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah jenis sarana prasarana operasionalisasi KPH	3 jenis	0 jenis	3 jenis	0 jenis	0 %	3 jenis	0 jenis	
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Luas Wilayah yang diusulkan untuk perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	500 ha	0 ha	500 ha	250 ha	50 %	500 ha	0 ha	
	Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencanan Pengelolaan KPH	24 dokumen	0 dokumen	24 dokumen	0 dokumen	0 %	24 dokumen	0 dokumen	
	- Penyusunan rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP KPH	15 dokumen	0 dokumen	7 dokumen	0 dokumen	0 %	7 dokumen	0 dokumen	



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 Triwulan II			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah dokumen RPHJPd	9 dokumen	0 dokumen	18 dokumen	0 dokumen	0 %	18 dokumen	0 dokumen	
	Kegiatan Pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung	Jumlah penerimaan dari sektor kehutanan	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	Rp. 91.654.000		Rp. 25.000.000	Rp. 401.304.600	
	- Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi	Luas areal pemanfaatan dan penggunaan kawasan di kawasan hutan produksi	120.425,79 ha	110.425,79 ha	110.425,79 ha	48.639,26 ha		110.425,79 ha	158.639,26 ha	
		Jumlah izin wajib bayar yang membayar iuran PSDH di hutan produksi	60 izin	60 izin	60 izin	40 izin		60 izin	40 izin	
		Jumlah produksi HHBK di kawasan hutan produksi	3.041,94 ton	3.041,94 ton	3.041,94 ton	1.665,95 ton		3.041,94 ton	1.665,95 ton	
	- Sub kegiatan Pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	12 lokasi	16 lokasi	1 lokasi		1 lokasi	0 lokasi	
	Kegiatan pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	Luas rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara	1.571 ha	1.571 ha	1.571 ha	0 ha	0 %	1.571 ha	1571 ha	
	- Sub kegiatan pengembangan perbenihan untuk rehabilitasi lahan	Jumlah bibit yang dihasilkan untuk rehabilitasi lahan	25.000 bibit	0 bibit	25.000 bibit	0 bibit	0 %	25000 bibit	0 bibit	
		Jumlah lokasi sumber benih yang dikembangkan	4 lokasi		4 lokasi			4 lokasi	0 lokasi	
	- Sub kegiatan pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan negara	Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	233 ha	233 ha	470 ha	0 ha	0 %	470 ha	233 ha	
		Luas pemeliharaan hutan rakyat	233 ha	0 ha	233 ha	0 ha	0 %	233 ha	0 ha	
	- Penyusunan rencana tahunan rehabilitasi lahan (RTnRL)	Jumlah dokumen rencana tahunan rehabilitasi lahan (RTnRL) yang disusun	2 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen		
	- Pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	Jumlah laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	3 laporan		1 laporan	0 laporan	0 %	1 laporan		
	- Pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara	Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara	230 ha	0 ha	230 ha	230	100 %	230 ha	230 ha	



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 Triwulan II			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi	Persentase jumlah kasus kerusakan kawasan hutan yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	- Sub kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	1.280 orang	424 orang	424 orang	180 orang	42,45 %	424 orang	180 orang	
	- Sub kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	Jumlah pelaksanaan patroli pencegahan dan pembuatan kerusakan kawasan hutan	768 kali patroli (48 kali/KPH)	768 kali patroli (48 kali/KPH)	768 kali patroli (48 kali/KPH)	549 kali	71,48	252 orang/kali/bulan/KPH	473 kali	
		Jumlah papan bicara pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	5 unit/KPH	5 unit/KPH	5 unit/KPH	0 unit/KPH	0 %	57 unit	0 unit/KPH	
	- Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	288 kali	288 kali	288 kali	55 kali	19,09	23 laporan	55 kali	
		Jumlah lokasi pelaksanaan operasi gabungan penanganan tindak pidana khusus kehutanan	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100 %	2 lokasi	1 lokasi	
	- Sub kegiatan Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/ penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan monitoring pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100 %	16 laporan	12 kali	
		Jumlah laporan titik api (hotspot) yang dipantau dan dikendalikan	16 laporan	16 laporan	16 laporan	16 laporan	100 %	16 laporan	16 laporan	
	Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu	Jumlah HHBK yang diolah oleh pemegang izin	3 jenis		3 jenis	0 jenis	0 %	3 jenis		
	- Sub kegiatan pengolahan bahan baku hasil hutan bukan kayu hayati	Jumlah produksi HHBK yang diolah oleh pemegang izin	49.187,134 ton		49.187,134 ton		0 %	49.187,134 ton		
	- Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin usaha industry primer hasil hutan bukan kayu (IUIPHHBK) melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah komitmen izin fasilitasi penerbitan IUIPHHBK	5 izin		5 izin	0 jenis	0 %	5 izin		
	- Pembudidayaan hasil hutan bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya	Luas areal budidaya HHBK	100 ha		100 ha	0 ha	0 %	100 ha		



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 Triwulan II			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	- Pengawasan perizinan pengolahan hasil hutan bukan kayu	Jumlah pemegang IUIPHBK yang diawasi	5 izin		5 jenis	0 jenis	0 %	5 izin		
	Kegiatan Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6.000 m3/tahun	Jumlah data dan informasi nilai ekspor hasil hutan	28.155,1717 ton	28.155,1717 ton	28.155,1717 ton	39.039,36 m ³		28.155,1717 ton	39.039,36 m ³	
	- Sub kegiatan rencana pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6.000 m3	Jumlah data asal usul rencana pemenuhan bahan baku	16 laporan		16 laporan	16 laporan	100 %	16 laporan		
		Jumlah data produksi kayu olahan	3 laporan		3 laporan	2 laporan	75 %	3 laporan		
		Jumlah industri yang aktif dan tertib aturan	16 laporan		16 laporan	24 laporan	100 %	16 laporan		
	- Sub kegiatan Pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6.000 m3/tahun	Jumlah data sebaran GANIS PHPL yang melaksanakan PUHH pada industri	40 orang	40 orang	40 orang	22 orang	50 %	40 orang	70 orang	
		Jumlah data pemasaran hasil hutan kayu lokal ekspor	24 laporan	24 laporan	24 laporan	3 laporan	12.5 %	24 laporan	24 laporan	
		Jumlah industri yang dibina dimonitoring dan dievaluasi	60 industri	60 industri	60 industri	30 industri	50 %	60 industri	25 industri	
	Kegiatan Perbenihan tanaman hutan	Jumlah sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan	95 pemohon	95 pemohon	95 pemohon	20 pemohon	21.05 %	95 pemohon	20 pemohon	
	- Sub kegiatan penetapan pengadaan benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar	Jumlah calon sumber benih yang diidentifikasi	15 lokasi		7 lokasi	3 lokasi	42.85%	7 lokasi		
		Jumlah pemohon pengada benih dan pengedar benih/ bibit tanaman hutan terdaftar	36 pemohon		15 pemohon	5 pemohon	75 %	15 pemohon		
	- Sub kegiatan sertifikasi sumber benih	Jumlah pemohon sertifikasi sumber benih	30 pemohon	36 pemohon	30 pemohon	3 pemohon	10 %	7 pemohon	18 pemohon	
	- Sub kegiatan sertifikasi mutu benih	Jumlah pemohon sertifikasi mutu benih	15 pemohon	0 pemohon	15 pemohon	9 pemohon	60 %	15 pemohon	9 pemohon	
	- Sub kegiatan sertifikasi mutu bibit	Jumlah pemohon sertifikasi mutu bibit	50 pemohon		15 pemohon	10 pemohon	66 %	10 pemohon		



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 Triwulan II			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	- Sub kegiatan pengawasan peredaran benih dan/atau bibit	Jumlah lkasi pengawasan peredaran benih dan/atau bibit tanaman hutan	24 kab/kota	24 kab/kota	24 kab/kota	8 kab/kota	33 %	24 kab/kota	15 kab/kota	
	Program konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya	Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata	2 jenis	2 jenis	2 jenis	0 jenis	0 %	2 jenis	2 jenis	
	Kegiatan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan provinsi	Jumlah izin penangkar tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	100 penangkar	100 penangkar	100 penangkar	0 penangkar	0 %	100 penangkar	18 penangkar	
	- Sub kegiatan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES	Jumlah peserta sosialisasi tata cara perizinan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	200 orang	200 orang	200 orang	0 orang	0 %	-	180 orang	
		Jumlah laporan monitoring pengendalian dan pengawasan penangkar tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0 laporan	0 %	1 laporan	1 laporan	
	Program Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Persentase jumlah pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	16,76 %	15,65 %	15,65 %	14,83 %	95 %	16,25 %	24,04 %	
	Kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	60 SDM	60 SDM	60 SDM	180 SDM	300 %	60 SDM	180 SDM	
		Jumlah masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya	1.000 orang (50 KTH)	1.000 orang (50 KTH)	1.000 orang (50 KTH)	1.365 orang	130 %	1.000 orang (50 KTH)	1.365 orang	
		Jumlah usaha perhutanan sosial yang ditingkatkan	50 KTH	50 KTH	50 KTH	67 KTH	134 %	50 KTH	67 KTH	
		Jumlah pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	350 KTH	350 KTH	350 KTH	350 KTH	100 %	350 KTH	350 KTH	
	- Sub kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi	Jumlah penyuluh kehutanan yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya	100 orang		100 orang			100 orang		



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 Triwulan II			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan									
		Jumlah SDM kehutanan yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya	200 orang		200 orang			200 orang		
		Jumlah unit penyelenggara penyuluhan yang dimonitoring dan dievaluasi	16 unit penyelenggara		16 unit penyelenggara			16 unit penyelenggara		
	- Sub kegiatan penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan	Jumlah KTH yang naik kelas kemampuannya	2 KTH		75 KTH			75 KTH		
	- Sub kegiatan penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial	Jumlah peserta sosialisasi/ rapat koordinasi perhutanan sosial	100 orang	100 orang	100 orang	75 orang	75 %	300 orang	150 orang	
		Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktifnya	84 kelompok tani/ KTH	84 kelompok tani/ KTH	84 kelompok tani/ KTH	6 kelompok	7,14 %	130 kelompok tani/ KTH	84 kelompok tani/ KTH	
		Jumlah kelompok perhutanan sosial yang dimonitoring dan dievaluasi	82 kelompok	82 kelompok	82 kelompok	18 kelompok	21,95 %	82 kelompok	120 kelompok	
		Jumlah peserta temu usaha KUPS	100 orang	100 orang	100 orang	55 orang	50 %	100 orang	65 orang	
		Jumlah laporan konflik tenurial PS yang difasilitasi penyelesaiannya	2 laporan	2 laporan	2 laporan	0 laporan	0 %	2 laporan	2 laporan	
		Jumlah produk KUPS yang dipromosikan	10 produk	10 produk	10 produk	5 produk	50 %	10 produk	10 produk	
	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Jumlah DAS yang direhabilitasi	2 DAS	2 DAS	2 DAS	0 DAS	0 %	2 DAS	2 DAS	
	Kegiatan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi	Jumlah DAS yang dikelola di provinsi sulawesi selatan	2 DAS	2 DAS	2 DAS	0 DAS	0 %	2 DAS	2 DAS	
	- Sub kegiatan Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang disusun	2 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0 %	2 dokumen	0 dokumen	
	- Sub kegiatan Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Jumlah DAS yang dioptimalisasikan fungsi dan daya dukungnya	2 DAS	2 Das	2 DAS	0 DAS	0 %	2 DAS	2 DAS	
	- Sub kegiatan penerapan Teknik konservasi tanah dan air di wilayah DAS	Jumlah unit dam penahan	34 unit	34 unit	34 unit	0 unit	0 %	80 unit	34 unit	
		Jumlah unit gully plug	22 unit	22 unit	22 unit	0 unit	0 %	90 unit	22 unit	



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 Triwulan II			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah unit sumur resapan	10 unit	0 unit	80 unit	0 unit	0 %	80 unit	0 unit	
	- Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah masyarakat dan pihak terkait yang hadir dan berpartisipasi pada kegiatan penanaman	250 orang		250 orang	0 orang	0 %	250 orang		
	- Sub kegiatan Pengembangan Kelembagaan pengelolaan DAS	Jumlah pertemuan rapat yang dilaksanakan	4 kali		4 kali	0 kali	0 %	4 kali		
	- Sub kegiatan Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	1 tahun		1 tahun	0 tahun	0%	1 tahun		
		Jumlah pertemuan atau rapat yang dilaksanakan	4 kali		4 kali	0 kali	0 %	4 kali		
	Program Penunjang Urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik	100 %	100 %	100 %	47,51 %	47,51 %		95,58 %	
		Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP	100 %	100 %	100 %	47,51 %	47,51 %		100 %	
		Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	47,51 %	47,51 %		98,19 %	
	Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	100 %	100 %	20,25 %	20,59		100 %	
	- Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50 %	2 dokumen	2 dokumen	
	- Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	3 dokumen	
	- Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 %	1 dokumen	3 dokumen	
	- Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	3 dokumen	
	- Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	3 dokumen	
	- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan	Jumlah laporan capaian ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	2 laporan	2 laporan	2 laporsn	1 dokumen	50 %	2 laporan	2 laporan	



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 Triwulan II			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		ikhtisar realisasi kinerja SKPD								
	- Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan data dan informasi yang dikumpulkan dan dipublikasikan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	0 laporan	0 %	2 laporan	2 laporan	
		Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	2 laporan	2 laporan	2 dokumen	1 dokumen	50 %	2 laporan	2 laporan	
	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	49,65 %	49,65 %	100 %	100 %	
	- Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji, tunjangan dan TPP	843 orang	843 orang	843 orang	843 orang	100 %	843 orang	786 orang	
	- Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah administrasi yang disusun	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0 laporan	0 %	1 laporan	1 laporan	
		Jumlah aparat SKPD yang dikelola administrasi kepegawaianya	843 orang	843 orang	843 orang	0 laporan	0 %	843 orang	843 orang	
	- Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi	50 dokumen		50 dokumen	0 laporan	0 %	50 dokumen		
	- Sub kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah pelaporan pelaksanaan akuntansi SKPD	2 laporan		2 laporan	0 laporan	0 %	2 laporan		
	- Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0 laporan	0 %	1 laporan	1 laporan	
	- Sub kegiatan Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	50 %	1 laporan	1 laporan	
	- Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah pelaporan keuangan yang tersusun	18 laporan	18 laporan	18 laporan	9 laporan	50 %	18 laporan	18 laporan	
	- Sub kegiatan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis yang disusun	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100 %	2 laporan	2 laporan	
	Kegiatan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah penyusunan dokumen laporan	2 dokumen	2 dokumen	2 laporan	2 laporan	100 %	2 laporan	2 dokumen	
	- Sub kegiatan koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan penilaian barang milik daerah SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	1 laporan	



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 Triwulan II			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	- Sub kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penyusunan barang milik daerah SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0 laporan	0 %	1 laporan	1 laporan	
	- Sub kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
	Kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah pendapatan daerah	1.712.430.000 rupiah		1.712.430.000 rupiah	48 %	48 %	1.712.430.000 rupiah		
	- Sub kegiatan Perencanaan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan perencanaan pengelolaan retribusi daerah	1 laporan		1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan		
	- Sub kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah kebijakan retribusi daerah yang disebarluaskan	1 laporan		1 laporan	1 laporan	46 %	1 laporan		
	- Sub kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan objek retribusi daerah	1 laporan		1 laporan	1 laporan	58 %	1 laporan		
	- Sub kegiatan Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan data retribusi daerah	1 laporan		1 laporan	0 laporan	0 %	1 laporan		
	- Sub kegiatan Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	1 laporan		1 laporan	0 laporan	0 %	1 laporan		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai perangkat daerah berdasarkan penilaian kinerja ASN	90 %	90 %	90 %	0 %	0 %			
	- Sub kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan	809 orang	0 orang	809 orang	0 orang	0 %	809 orang	0 orang	
		Jumlah pakaian lapangan yang diadakan	399 orang	0 orang	399 orang	0 orang	0 %	399 orang	0 orang	
		Jumlah pakaian korpri yang diadakan	809 orang	0 orang	809 orang	0 orang	0 %	809 orang	0 orang	
		Jumlah pakaian batik khas daerah yang diadakan	809 orang	0 orang	809 orang	0 orang	0 %	809 orang	0 orang	
		Jumlah pakaian olahraga dan perlengkapannya yang diadakan	809 orang	0 orang	809 orang	0 orang	0 %	809 orang	0 orang	
	- Sub kegiatan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang diadakan	1 laporan		1 laporan	1 laporan	45,83	1 laporan		
	- Sub kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah laporan sistem informasi kepegawaian	1 laporan		1 laporan	0 laporan	0 %	1 laporan		



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 Triwulan II			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	- Sub kegiatan Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah laporan hasil evaluasi penilaian kinerja pegawai	1 laporan		1 laporan	1 laporan	44,83 %	1 laporan		
	- Sub kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah aparat SKPD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 orang		100 orang	0 orang	0 %	100 orang		
	- Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan Perundang-undangan	100 orang		100 orang	0 orang	0 %	100 orang		
	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	100 %	100 %	100 %	42,59 %	42,59 %	100 %	100 %	
	- Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	26 unit		26 unit	9 jenis	33,33 %	26 unit		
	- Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	300 unit		300 unit	0 unit	0 %	300 unit		
	- Sub kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	10 jenis		10 jenis	0 jenis	0 %	10 jenis		
	- Sub kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah logistik yang tersedia	2 jenis	2 jenis	2 jenis	1 jenis	33,49 %	2 jenis	2 jenis	
	- Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10 jenis		10 jenis	2 jenis	15,59 %	10 jenis		
	- Sub kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 tahun		1 tahun	0,5 tahun	50 %	1 tahun		
	- Sub kegiatan penyelenggaraan rapat konsultasi dan konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas	1 tahun	1 tahun	1 tahun	0,5 tahun	57,68 %	1 tahun	1 tahun	
	- Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis SKPD yang tertata	50 arsip		50 arsip	0 arsip	0 %	50 arsip		
	- Sub kegiatan Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD yang tersedia	3 sistem		3 sistem	0 sistem	0 %	3 sistem		
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		100 %	9,76 %	9,76 %	100 %		



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 Triwulan II			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	- Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan	1 unit		1 unit	0 unit	0 %	1 unit		
	- Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan operasional dinas	1 unit		1 unit	0 unit	0 %	1 unit		
	- Sub kegiatan Pengadaan mebel	Jumlah lemari arsip yang tersedia	60 unit		60 unit	0 unit	0 %	60 unit		
		Jumlah meja kerja pejabat eselon/staf yang tersedia	100 unit		100 unit	0 unit	0 %	100 unit		
		Jumlah kursi kerja pejabat eselon/staf yang tersedia	100 unit		100 unit	0 unit	0 %	100 unit		
	- Sub kegiatan Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	1 unit		1 unit	0 unit	0 %	1 unit		
	- Sub kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	8 unit		8 unit	0 unit	0 %	8 unit		
	- Sub kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	8 unit		8 unit	3 unit	53 %	8 unit		
	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	38,70 %	38,70 %	100 %	100 %	
	- Sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	1 tahun		1 tahun	0,5 tahun	19,23 %	1 tahun		
	- Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terbayarkan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	0,5 tahun	33,37 %	1 tahun	1 tahun	
	- Sub kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 tahun		1 tahun	0 tahun	0 %	1 tahun		
	- Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa tenaga non PNS	362 orang	362 orang	377 orang	377 orang	39,35 %	377 orang	370 orang	
	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	100 %	28,74	28,74 %	100 %	100 %	



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 Triwulan II			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	- Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	33,48 %	1 unit	1 unit	
		Jumlah pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan roda 4	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit		1 unit	1 unit	
	- Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	43 unit	43 unit	43 unit		44 %	43 unit	43 unit	
		Jumlah pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 4	39 unit	39 unit	39 unit			39 unit	18 unit	
		Jumlah pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 2	282 unit	382 unit	382 unit			382 unit	89 unit	
	- Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	10 unit		10 unit	2 unit	17,91 %	10 unit		
	- Sub kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang di pelihara	5 unit		5 unit	0 unit	0 %	5 unit		
	- Sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	25 unit	25 unit	25 unit	0 unit	0 %	25 unit	25 unit	
	- Sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 tahun		1 tahun	0 tahun	0 %	1 tahun		
	- Sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 tahun		1 tahun	0 tahun	0 %	1 tahun		



Berdasarkan tabel 2 di atas menggambarkan bahwa capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2022 triwulan II, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Hutan

Program pengelolaan hutan mendukung pencapaian sasaran kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

- a. Indeks kualitas tutupan lahan
- b. Persentase kontribusi PDRB kehutanan terhadap PDRB Sulsel
- c. Luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi
- d. Persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya
- e. Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan

Adapun indikator program pengelolaan hutan sebagai berikut :

- a. Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi
- b. Persentase kerusakan hutan per tahun
- c. Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan
- d. Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu

Pencapaian indikator Program Pengelolaan Hutan diuraikan sebagai berikut:

- a. Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi

Luas lahan kritis di Sulawesi Selatan masih terdapat ± 402.430 ha dengan tingkat kekritisannya sangat kritis dan kritis baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan menjadi kewenangan provinsi sebagaimana diatur pada UU No. 23 tahun 2014, namun pelaksanaan rehabilitasi lahan tersebut sangat ditentukan partisipatif masyarakat karena sasaran lokasi berada pada tanah milik masyarakat yang bersifat privat, sehingga diperlukan singleritas dan dukungan masyarakat dan pemerintah.

Indikator cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi merupakan salah satu upaya pembentuk tutupan lahan bervegetasi pohon dan akan menjadi faktor pembentuk indeks kualitas tutupan lahan. Luas rehabilitasi hutan dan lahan pada tahun 2022 triwulan II masih nihil.



Rehabilitasi lahan akan dilaksanakan berupa pembuatan hutan rakyat pada bulan oktober-desember 2022 dimana diperkirakan musim hujan sudah merata pada beberapa daerah dengan intensitas curah hujan tinggi. Keberhasilan penanaman hutan rakyat berpengaruh pada ketersediaan air untuk proses pertumbuhan tanaman.

b. Persentase kerusakan hutan per tahun

Kerusakan hutan masih menjadi perhatian dan fokus pemerintah untuk menurunkan atau meminimalisasi tingkat kerusakannya. Kerusakan hutan di Sulawesi Selatan masih disebabkan oleh kebakaran hutan dan perambahan hutan. kerusakan hutan akan mempengaruhi fungsi dan kawasan hutan baik secara fisik maupun kimia tanah sehingga berdampak pada produktifitas hutan. Kerusakan kawasan hutan tahun 2022 Triwulan II yang diakibatkan Kejadian kerusakan kawasan tahun 2022 triwulan II yaitu penebangan/ pengangkutan hasil hutan tanpa izin (illegal logging) sebanyak 159 batang, 107,63 m³, perambahan/ perkebunan dalam kawasan seluas 248,44 ha, dan kebakaran hutan seluas 35 ha.

c. Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan

Produksi hasil hutan kayu olahan merupakan penyokong PDRB sektor kehutanan. Realisasi produksi kayu olahan sebesar 75.108,9623 m³ dari target 92.336,6200 m³. Produksi kayu olahan tersebut yaitu produksi veneer sebesar 48.999,0393 m³, produksi kayu gergajian sebesar 4.364,3349 m³, produksi plywood sebesar 21.416,3955 m³, produksi moulding sebesar 329,1926 m³.

d. Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu

Produksi hasil hutan bukan kayu juga penyokong PDRB sektor kehutanan. Realisasi produksi hasil hutan bukan kayu sebesar 571,319 ton dari target 283 ton.

2. Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya :

Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya mendukung pencapaian sasaran kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu:

- a. Persentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau satwa liar yang tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata



Adapun indikator Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya adalah jumlah tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau satwa liar yang tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata.

Pencapaian Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya melebihi target, dengan realisasi sebesar 14,49 % dari target 10 %. Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau satwa liar yang tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata sebanyak 173 jenis.

Capaian program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya dipengaruhi karena:

- a. Melakukan identifikasi jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau satwa liar yang tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi
 - b. Sosialisasi jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau satwa liar yang tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES
3. Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan

Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan mendukung pencapaian sasaran kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan didalam dan disekitar kawasan hutan dalam rangka pemberdayaan responsive gender melalui pemberian peluang kerja dan kesempatan berusaha yang berbasis pelestarian sumber daya hutan.

Perhutanan sosial merupakan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan dan menjadi progam nasional dengan memberikan akses pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam jangka waktu tertentu dengan azas kelestarian dan keberlanjutan hutan. Akses pengelolaan hutan tersebut terdiri dari hutan



desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan.

Indikator program Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan yaitu persentase jumlah pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan.

Capaian program ini tahun 2022 triwulan II mencapai 180.730,01 Ha dengan pemegang izin perhutanan sosial sebanyak 449 kelompok.

Capaian kinerja program perhutanan sosial dipengaruhi oleh:

- a. Adanya kelompok kerja percepatan perhutanan sosial di Provinsi Sulawesi Selatan dengan tugas menyusun roadmap perhutanan sosial, koordinasi dan sosialisasi, fasilitasi dan pendampingan, fasilitasi pengembangan usaha, pengendalian, monitoring dan evaluasi perhutanan sosial, fasilitasi pembentukan kelompok kerja percepatan perhutanan sosial kabupaten/kota, diseminasi dan informasi perhutanan sosial, fasilitasi dan mediasi konflik tenurial perhutanan sosial. Kelompok kerja perhutanan sosial terdiri atas pemerintah pusat (BPSKL), pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, lembaga pendidikan tinggi (Universitas Hasanuddin dan Universitas Muhammadiyah), media, yayasan, LSM, Organisasi non Pemerintah
 - b. Keterlibatan penyuluh dan pendamping perhutanan sosial mulai penyiapan perhutanan sosial, pendampingan kelola kelembagaan, pendampingan kelola usaha, pendampingan kelola kawasan kelompok tani.
 - c. Fasilitasi alat usaha ekonomi produktif kepada kelompok tani hutan sebagai upaya pertambahan nilai ekonomi usaha kelompok.
4. Program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
- Program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) mendukung pencapaian sasaran rehabilitasi hutan dan lahan dengan indikator indeks kualitas tutupan lahan.

Adapun indikator kinerja program Daerah Aliran Sungai (DAS) adaah jumlah DAS yang direhabilitasi.



Capaian program Daerah Aliran Sungai tahun 2022 triwulan II mencapai 14,78 %. Capaian program ini akan didukung melalui penerapan teknik konservasi melalui pembuatan bangunan konservasi berupa dam penahan, sumur resapan dan gully plug saat ini dalam proses pengerjaan konstruksi bangunan konservasi tanah dan air, pada bulan nopember akan

Pencapaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 triwulan II memberi kontribusi terhadap pembangunan daerah Sulawesi Selatan diantaranya :

1. Kontribusi ekonomi terhadap PDRB Sulawesi Selatan.

Kontribusi kehutanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan tergabung pada PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Pertumbuhan PDRB berdasarkan sektor lapangan usaha Sulawesi Selatan pada tahun 2022 triwulan II memberi kontribusi sebesar 22,94 % dengan pertumbuhan PDRB (y to y) sebesar 0,92 %, jika dibandingkan pada triwulan II tahun 2021 sebesar 3,04 atau mengalami penurunan.

2. Rehabilitasi hutan dan lahan

Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya perbaikan daya dukung lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Rehabilitasi hutan dan lahan memberi kontribusi terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Salah satu unsur IKLH adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang menjadi sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Nilai IKTL provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 sebesar 54,94, tahun 2019 sebesar 58,06, tahun 2020 sebesar 55,10 dan tahun 2021 sebesar 55,40.

Kualitas tutupan lahan yang baik ditandai adanya mayoritas luasan tutupan lahan vegetasi pada suatu daerah. Kondisi tutupan lahan sangat tergantung pada upaya rehabilitasi hutan dan lahan pada lahan kritis dan langkah preventif kerusakan kawasan hutan dan hasil hutan.

3. Kerusakan kawasan hutan

Pengendalian kerusakan kawasan hutan dan lahan adalah upaya perlindungan daya tampung lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke



dalamnya. Perlindungan kawasan hutan dari kerusakan yang disebabkan kebakaran hutan, perambahan hutan, illegal logging.

4. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan

Masyarakat sekitar hutan masih bergantung pada potensi hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Berbagai jenis usaha kelola kawasan memungkinkan dikembangkan seperti pengolahan aren, kopi, dan madu. Masyarakat sekitar hutan tergabung secara berkelompok dengan membuat kelompok tani hutan dalam menjalankan kelola usaha dan kelola kawasan secara legal melalui perhutanan sosial. Perkembangan izin perhutanan sosial terus mengalami peningkatan, dan ini menunjukkan bahwa perhutanan sosial masih diminati masyarakat sekitar hutan karena memberikan akses legal dalam mengelola hutan tanpa ada kekhawatiran lagi.

Izin pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial pada tahun 2018 seluas 52.529,22 ha, tahun 2019 seluas 80.425,79 ha, tahun 2020 seluas 161.133,22 ha, tahun 2021 seluas 175.802,42 ha, tahun 2022 triwulan II seluas 180.730,01 ha

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun indikator kinerja kunci outcome Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial
2. Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)
3. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi
4. Kontribusi kehutanan terhadap PDRB
5. Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan



Tabel TC_30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial		%	15,65	16,25	16,76	16,76	15,80	24,40	25,15	25,15	
2	Persentase kerusakan hutan per tahun (deforestasi)		%	17,59	16,20	14,82	14,82	0,70	0,08	14,82	14,82	
3	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi		%	57,91	61,60	65,47	65,47	35,19	65,61	65,47	65,47	
4	Kontribusi kehutanan terhadap PDRB		%	0,07	0,07	0,08	0,08	0,06	0,06	0,08	0,08	
5	Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan		%	75,67	75,67	75,67	75,67	75,67	75,67	75,67	75,67	



Pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) outcome sesuai tabel di atas diuraikan sebagai berikut :

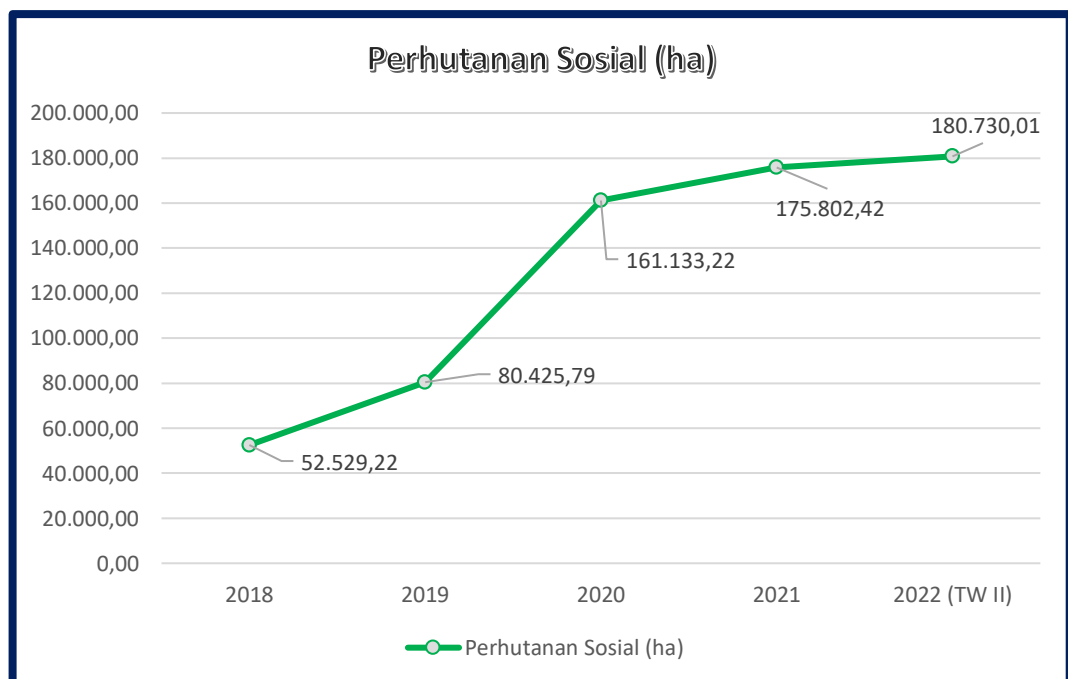
1. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial

Perhutanan sosial menjadi suatu solusi dan tantangan pembangunan sektor kehutanan. Keadaan ini menjadi perhatian bagi pemerintah dan stakeholder lainnya. Perhutanan sosial menjadi solusi karena masyarakat dan lembaga desa diberi akses legal pengelolaan hutan dalam jangka waktu tertentu. Dengan akses legal tersebut masyarakat dapat mengelola kawasan hutan dengan mempertimbangkan potensi hutan tersebut, dengan harapan mampu mendorong perekonomian mikro bagi masyarakat.

Pencapaian pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial sampai dengan tahun 2022 triwulan II mencapai 180.730,01 ha atau 10,15 % dari luas hutan lindung dan hutan produksi seluas 1.780.029 ha.

Perkembangan perhutanan sosial dapat dilihat pada diagram berikut :

Diagram 1
Perkembangan perhutanan sosial 2022



Akses legal pengelolaan hutan dilaksanakan dalam bentuk skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan



Kulin KK, yang dikelola oleh kelompok tani hutan berjumlah 449 kelompok tani.

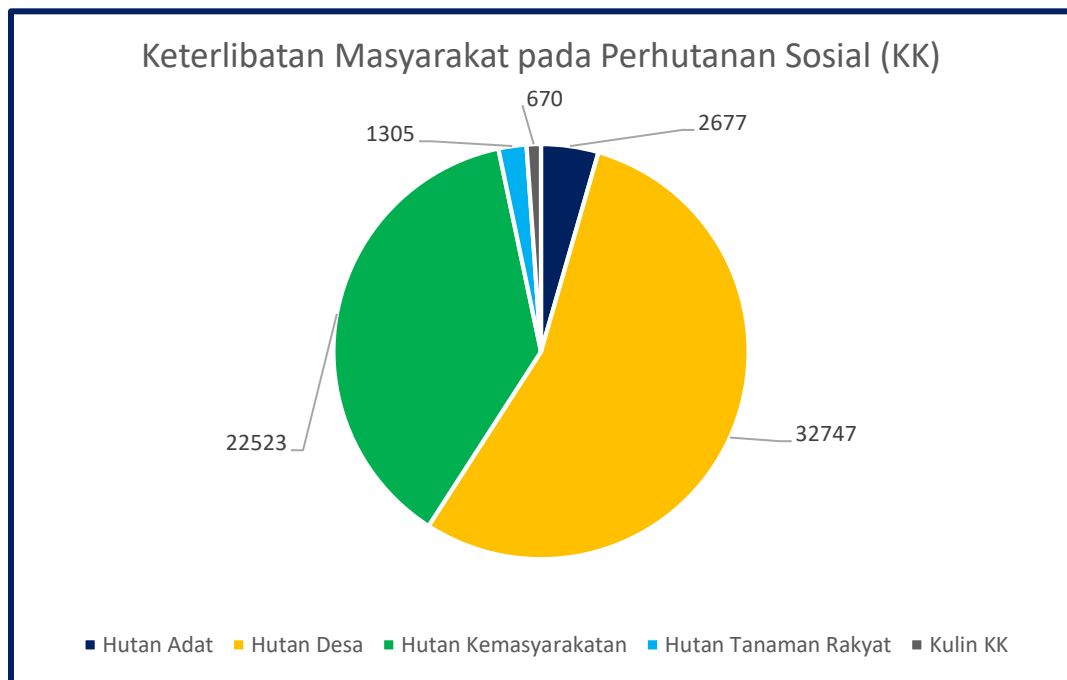
Diagram 2
Kelompok Tani Hutan Tahun 2022



Perkembangan pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini memberi gambaran masyarakat memafaatkan akses mengelola hutan semakin besar dan secava legal, yang tentunya partisipasi aktif ini diperlukan pembinaan dan pengendalian, serta peningkatan usaha masyarakat sehingga dapat memberi dampak peningkatan ekonomi masyarakat. Melalui perhutanan sosial menjadi salah satu solusi penyelesaian sengketa tenurial lahan hutan yang selama ini menjadi persoalan pembangunan kehutanan. Pada tahun 2022 Triwulan II jumlah KK yang terlibat dalam perhutanan sosial mencapai 59.922 KK mencakup luas garapan seluas 180.730,01 ha.



Diagram 3
Pelibatan Masyarakat pada Perhutanan Sosial Tahun 2022

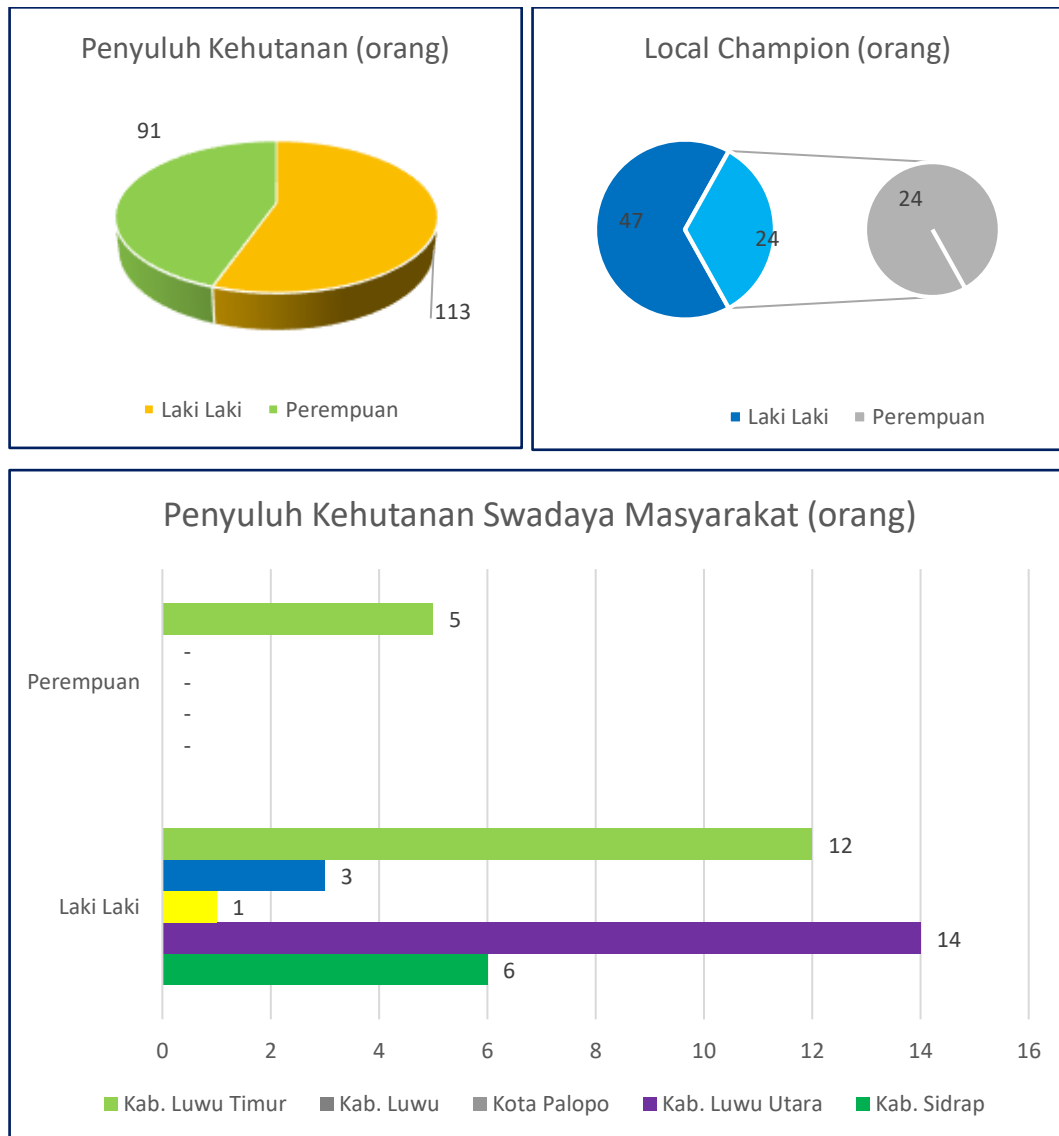


Keterlibatan masyarakat tersebut diatas melakukan kelola kawasan, kelola usaha dan kelola kelembagaan sangat ditentukan dari pelibatan tenaga penyuluh kehutanan, local champion PS dan PKSM. Pelibatangnya berperan dalam pendampingan dan penyuluhan untuk peningkatan mutu dan akses pasar yang lebih luas. Jumlah tenaga penyuluh kehutanan masih sangat terbatas jika dibanding dengn jumlah kelompok dan aksesibilitas lokasi, sehingga pendampingan kelompok dibantu oleh tenaga local champion, dan PKSM. Adapun tenaga penyuluh, local champion dan PKSM sebagai berikut :



Diagram 4

Penyuluh Kehutanan, Local Champion, PKSM Tahun 2022



Berdasarkan diagram di atas, menunjukkan bahwa peran laki-laki lebih dominan dibanding perempuan dalam melakukan pendampingan, penyuluhan kepada kelompok tani. Komposisi gender tenaga penyuluh kehutanan laki laki mencapai 55 % dan perempuan 45 %, komposisi gender local champion laki laki mencapai 66 % dan perempuan 34 %, komposisi gender penyuluh kehutanan swadaya masyarakat laki laki mencapai 88 % dan perempuan 12 %.

Dengan demikian prinsip akses, partisipasi, control dan manfaat pendampingan dan penyuluhan telah memberikan keadilan dan kesetaraan gender laki-laki dan perempuan dalam upaya mengembangkan mutu dan akses pasar produk hasil hutan.

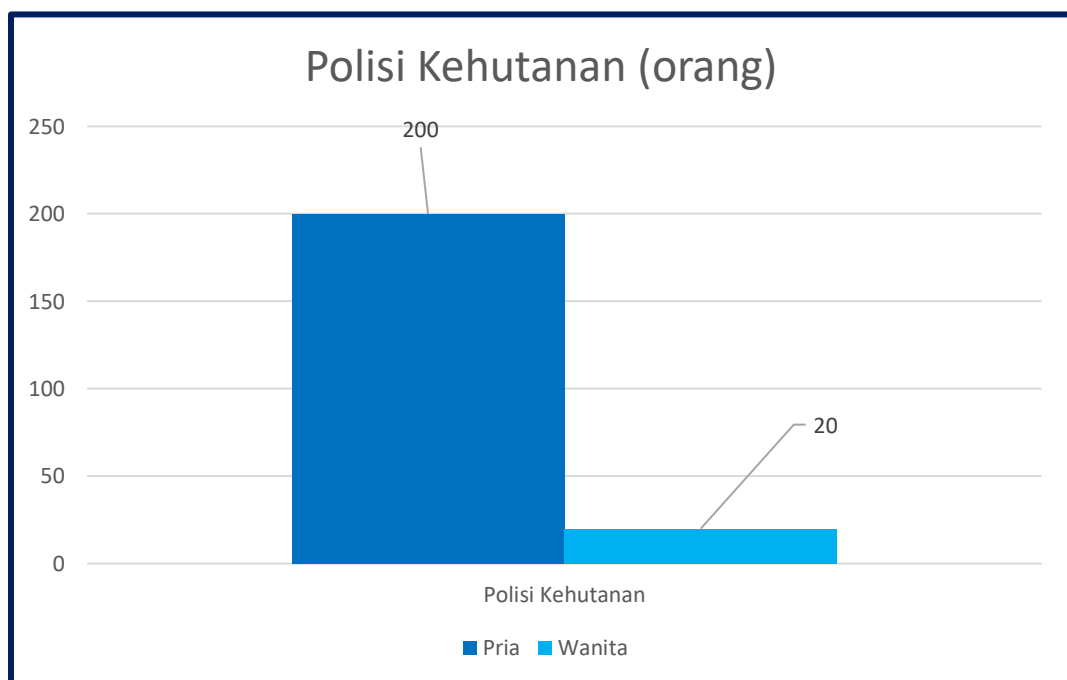


2. Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi).

Kerusakan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan masih menjadi tantangan pembangunan kehutanan. Aktivitas masyarakat sekitar hutan menjadi potensi terjadinya kerusakan hutan, sebagian besar masyarakat memanfaatkan hutan sebagai lahan budidaya tanaman semusim yang memiliki masa panen singkat. Upaya perlindungan dan pengamanan hutan dari kerusakan hutan terus dilakukan dengan pendekatan persuasif sehingga diharapkan adanya kesadaran untuk menjaga ekosistem hutan yang ada. Upaya preventif perlindungan dan pengamanan hutan dilakukan secara rutin oleh polisi kehutanan dengan melakukan patroli pengamanan hutan sekaligus memberikan edukasi, sosialisasi batas-batas kawasan hutan.

Pengarusutamaan gender dalam aktivitas patroli pengamanan hutan melibatkan polisi kehutanan pria dan polisi kehutanan wanita, dengan tugas melakukan pengendalian, pembatasan kerusakan hutan. Jumlah polisi kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 triwulan II berjumlah 220 orang dengan rincian sebagai berikut :

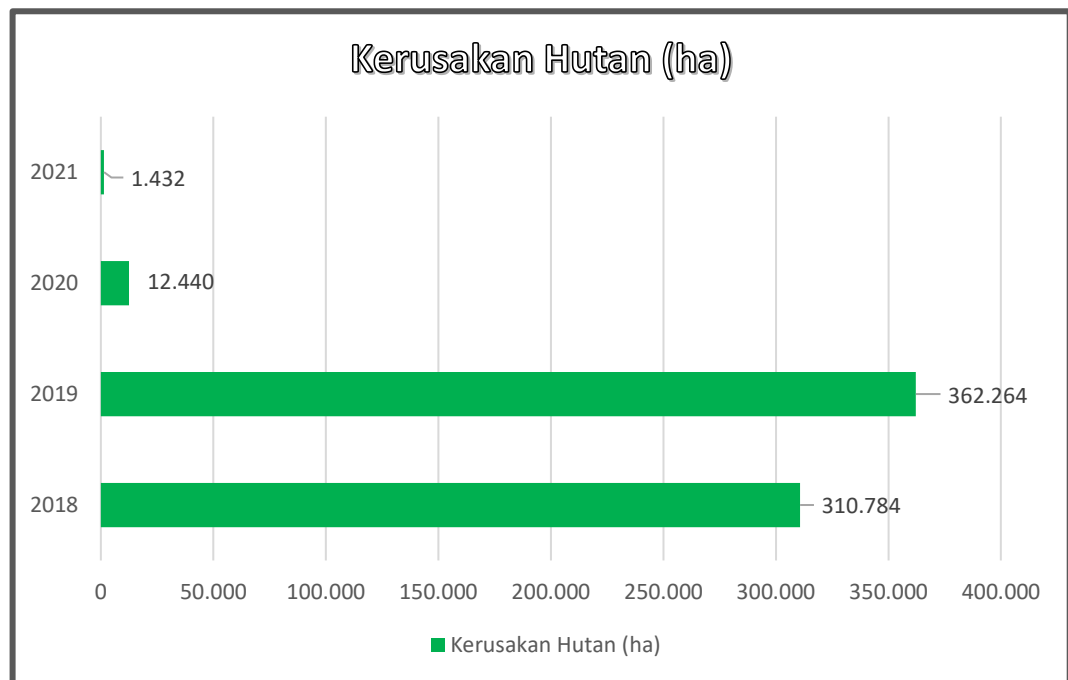
Diagram 5
Polisi Kehutanan Tahun 2022





Kejadian kerusakan hutan disebabkan pemanfaatan hutan tanpa izin (perambahan hutan), kebakaran hutan dan illegal logging, dengan perkembangan kerusakan hutan disajikan pada diagram berikut :

Diagram 6
Kerusakan Kawasan Hutan



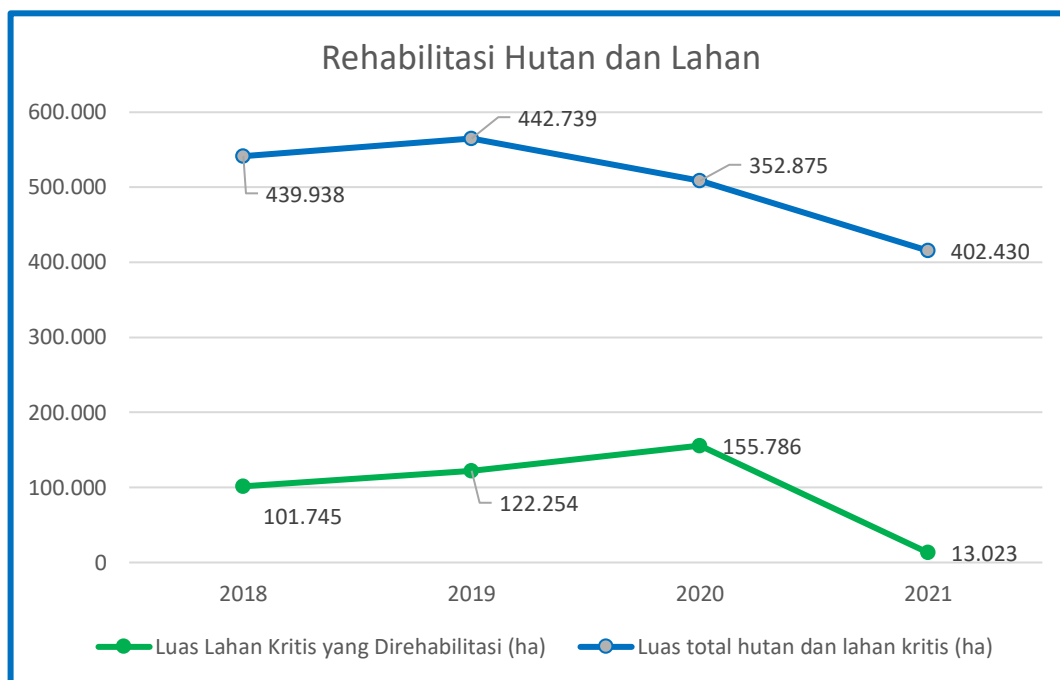
Berdasarkan diagram diatas menunjukkan bahwa, kerusakan hutan mengalami penurunan menjadi 1.432 ha. Penurunan ini disebabkan tahun 2019 luas lahan kritis masih menjadi bagian penghitungan kerusakan hutan, yang semestinya menjadi bagian penghitungan luas lahan kritis yang direhabilitasi.

3. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi

Lahan kritis menjadi prioritas pembangunan kehutanan, dengan luas lahan kritis mencapai 352.874,59 ha pada tahun 2020. Salah satu strategi penanganan lahan kritis melalui pelibatan semua stakeholder untuk melakukan penanaman. Perkembangan rehabilitasi hutan dan lahan disajikan sebagai berikut :



Diagram 7
Rehabilitasi Hutan dan Lahan



4. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

Hutan memiliki nilai ekonomi yang sangat besar, tetapi hanya sebagian kecil dari sumber daya hutan yang berkontribusi secara riil terhadap penerimaan negara dan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari pencapaian Kontribusi Sektor kehutanan terhadap PDRB provinsi Sulawesi Selatan dari tahun ketahun mengalami penurunan, dimana capaian pada tahun 2018 sebesar 0,06 persen, tahun 2019 tetap 0,06 persen, pada tahun 2020 sebesar 0,06 dan tahun 2021 sebesar 0,6 %. Secara persentase menunjukkan kecilnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan, namun secara nilai terus mengalami pertambahan dari tahun ke tahun.

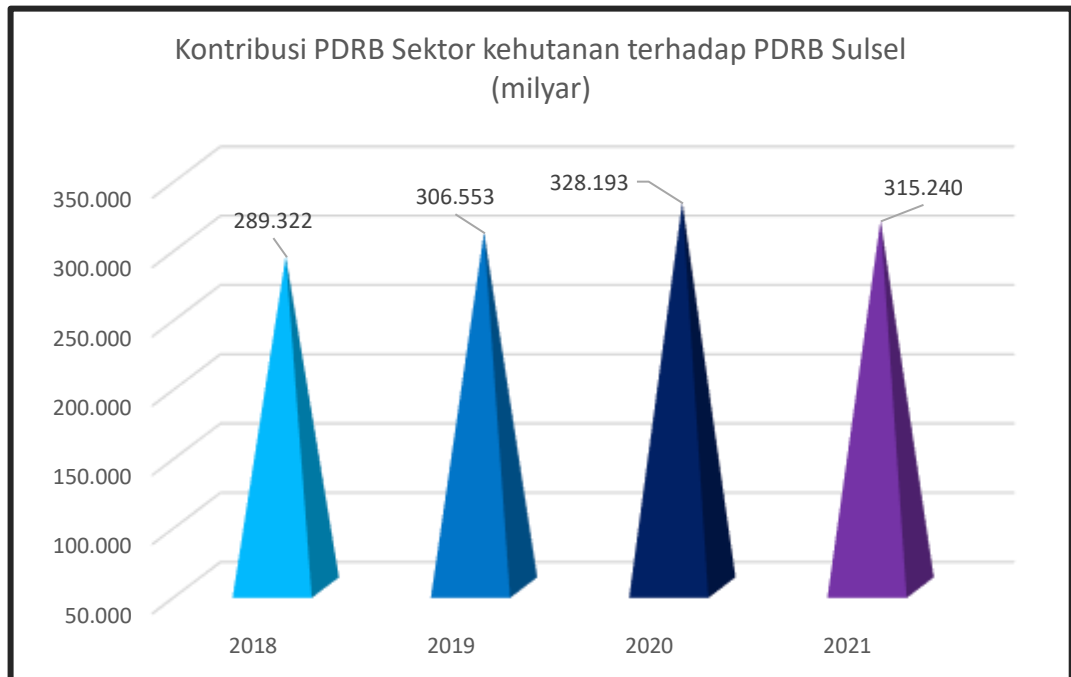
Kontribusi kehutanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan berdasarkan lapangan usaha memberi kontribusi sebesar 0,06 % pada tahun 2018 dengan nilai PDRB sebesar 289.321,7 milyar dan pada tahun 2019 sebesar 0,06 % dengan nilai PDRB sebesar Rp. 306.553,3 milyar. Pada tahun 2020 sebesar 0,06 % dengan nilai PDRB sebesar Rp. 328.192,82 milyar. Pada tahun 2021 sebesar 0,06 % dengan nilai PDRB sebesar Rp. 315.240 milyar Kontribusi kehutanan tersebut berasal dari produksi hasil



hutan kayu olahan dan produksi hasil hutan bukan kayu, dan belum menghitung nilai pemanfaatan jasa lingkungan/ekowisata.

Diagram 8

Kontribusi PDRB Sektor Kehutanan



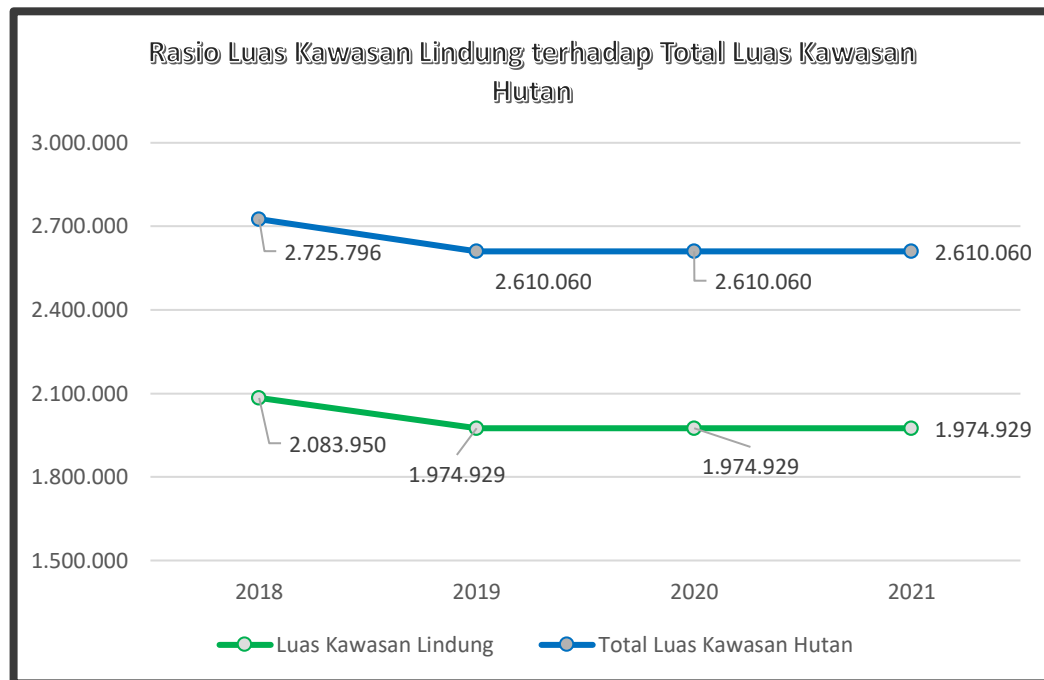
5. Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan
Bila melihat rasio luas kawasan lindung terhadap total Luas Kawasan Hutan

Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2015 sampai tahun 2019, menunjukkan bahwa rasio luas kawasan lindung terhadap luas kawasan hutan di Sulawesi Selatan pada periode sebelumnya (2015-2018) sebesar 76,45 persen menurun menjadi 75,66 persen pada tahun 2020.



Diagram 9

Rasio Luas Kawasan Lindung terhadap Total Luas Kawasan Hutan

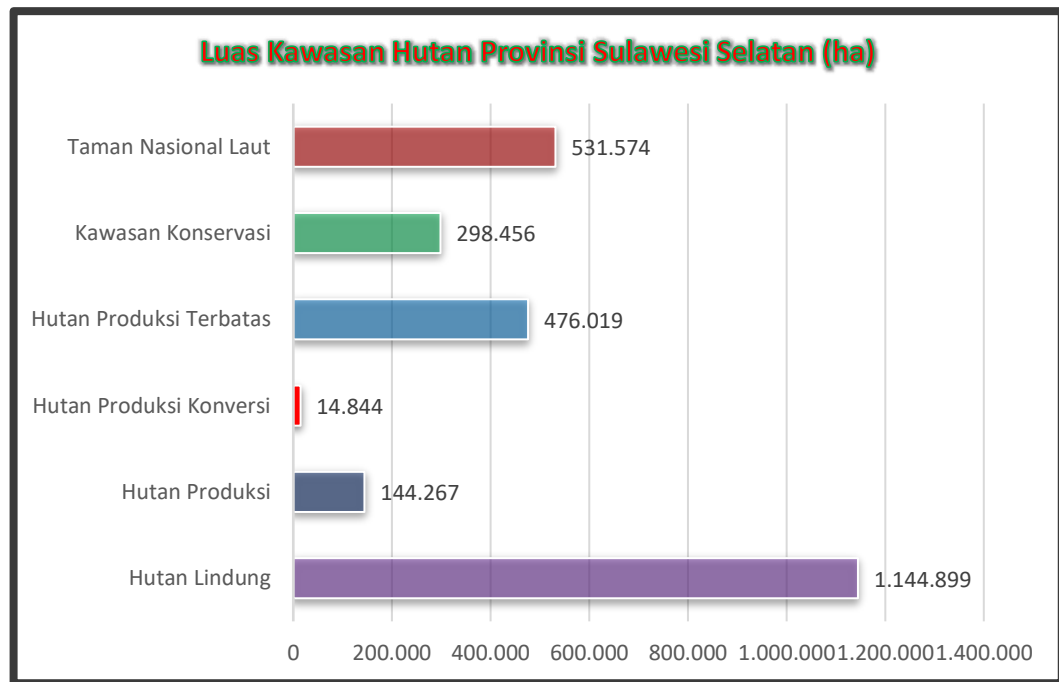


Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan tahun 2021 mencapai 75,66 %, merupakan luas rasio luas kawasan hutan lindung dan Kawasan pelestarian alam (hutan suaka alam, cagar alam) terhadap luas Kawasan hutan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 362/MenLHK/setjen/PLA.0/5/2019 bahwa luas kawasan hutan di provinsi Sulawesi Selatan seluas 2.610.060 ha, tersaji pada diagram berikut :



Diagram 10

Luas Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan



2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Isu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan antara lain :

1. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung dan hutan produksi.

Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung diperuntukkan untuk hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan akan memberi dampak pada ekonomi daerah namun harus tetap memperhatikan asas kelestarian dan keberlanjutan. Potensi kawasan hutan cukup beragam mulai pengembangan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan/ekowisata, namun belum dimanfaatkan secara optimal karena membutuhkan dukungan berbagai pihak.

2. Adanya kerusakan wilayah DAS

Di provinsi Sulawesi Selatan terdapat DAS lintas provinsi, DAS lintas kabupaten, dan DAS dalam Kabupaten. Kondisinya terdapat DAS yang perlu dipertahankan dan DAS yang perlu dipulihkan. Salah satu DAS lintas provinsi yang memerlukan pemulihan yaitu DAS Saddang dan salah



satu DAS lintas kabupaten yang perlu dipulihkan yaitu DAS Jeneberang seluas 78.883,90 ha.

3. Masih adanya kasus illegal logging

4. Belum optimalnya pengelolaan persetujuan perhutanan sosial

Salah satu partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan yaitu melalui perhutanan sosial dengan skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kulin KK. Keikutsertaan masyarakat masih relatif rendah. Pengelolaan persetujuan perhutanan sosial belum optimal disebabkan karena pendampingan belum mencakup semua kelompok perhutanan sosial.

Permasalahan yang masih menjadi tantangan di sektor kehutanan antara lain:

1. Belum optimalnya upaya pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Masih terdapatnya konflik kepemilikan dan pemanfaatan kawasan hutan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pembangunan;
3. Masih terdapatnya lahan kritis dan belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis;
4. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan belum optimal, utamanya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan rancangan akhir Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 dengan memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif perangkat daerah. maka kebutuhan rencana kerja Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022, sebagaimana tabel berikut :



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022

Tabel TC-31

Review terhadap Perubahan RKPD tahun 2022 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi	65,47%	18.241.969.700	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi	65,47%	18.241.969.700	
			Persentase kerusakan hutan	14,82%				Persentase kerusakan hutan	14,82%		
			Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan	92.336,62 m ³				Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan	92.336,62 m ³		
			Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu	283 ton				Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu	283 ton		
1	Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan KPH Kewenangan Provinsi		Luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	1.780.029 ha	201.130.000	Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan KPH Kewenangan Provinsi		Luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	1.780.029 ha	201.130.000	
a	Penyusunan rancang bangun tata hutan wilayah KPH	Bantaeng Bone Maros Soppeng Makassar	Jumlah dokumen rancang bangun KPH	2 dokumen	100.000.000	Penyusunan rancang bangun tata hutan wilayah KPH	Bantaeng Bone Maros Soppeng Makassar	Jumlah dokumen rancang bangun KPH	2 dokumen	100.000.000	
b	Pembagian blok/petak pengelolaan hutan KPH	Sulsel	Jumlah patok batas blok dan petak	748 buah	0	Pembagian blok/petak pengelolaan hutan KPH	Sulsel	Jumlah patok batas blok dan petak	748 buah	0	
		Sulsel	Panjang penataan batas blok dan petak	150 km			Sulsel	Panjang penataan batas blok dan petak	150 km		
c	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Makassar	Jumlah jenis sarana prasarana operasionalisasi KPH	3 jenis	0	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Makassar	Jumlah jenis sarana prasarana operasionalisasi KPH	3 jenis	0	
e	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Bamtaeng Barru Bone Bulukumba Enrekang Gowa jeneponto Luwu Lutra Maros Pangkep Pinrang Selayar Sidrap Sinjai Soppeng Takalar Tator Wajo Parepare Palopo Lutim Torut	Luas Wilayah yang diusulkan untuk perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	500 ha	101.130.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Bamtaeng Barru Bone Bulukumba Enrekang Gowa jeneponto Luwu Lutra Maros Pangkep Pinrang Selayar Sidrap Sinjai Soppeng Takalar Tator Wajo Parepare Palopo Lutim Torut	Luas Wilayah yang diusulkan untuk perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	500 ha	101.130.000	



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Jumlah Dokumen Rencanan Pengelolaan KPH	24 dokumen	0	Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Jumlah Dokumen Rencanan Pengelolaan KPH	24 dokumen	0	
a	Penyusunan rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Gowa, Jeneponto Bantaeng, Snejai Selayar, Maros sidrap Pinrang Tator Torut Luwu Lutim Lutra Wajo Soppeng Barru	Jumlah dokumen RPHJP KPH	18 dokumen	0	Penyusunan rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Gowa, Jeneponto Bantaeng, Snejai Selayar, Maros sidrap Pinrang Tator Torut Luwu Lutim Lutra Wajo Soppeng Barru	Jumlah dokumen RPHJP KPH	18 dokumen	0	
			Jumlah dokumen RPHJPD	7 dokumen				Jumlah dokumen RPHJPD	7 dokumen		
3	Kegiatan Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Jumlah penerimaan dari sektor kehutanan	Rp. 25.000.000	5.499.940.000	Kegiatan Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Jumlah penerimaan dari sektor kehutanan	Rp. 25.000.000	5.499.940.000	
a	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi	Enrekang Gowa Pinrang Sinjai tator	Luas areal pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di kawasan hutan produksi	110.425,79 ha	67.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi	Enrekang Gowa Pinrang Sinjai tator	Luas areal pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di kawasan hutan produksi	110.425,79 ha	67.000.000	
			Jumlah izin wajib bayar yang membayar iuran PSDH di hutan produksi	60 izin				Jumlah izin wajib bayar yang membayar iuran PSDH di hutan produksi	60 izin		
			Jumlah produksi HHBK di kawasan hutan produksi	3.041,94 ton				Jumlah produksi HHBK di kawasan hutan produksi	3.041,94 ton		
b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Enrekang Gowa Pinrang Sinjai Tator	Jumlah Lokasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di kawasan hutan lindung	10 lokasi	68.340.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Enrekang Gowa Pinrang Sinjai Tator	Jumlah Lokasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di kawasan hutan lindung	10 lokasi	68.340.000	
			Jumlah Lokasi wajib bayar yang membayar iuran PSDH di hutan lindung	10 lokasi				Jumlah Lokasi wajib bayar yang membayar iuran PSDH di hutan lindung	10 lokasi		
			Jumlah Lokasi HHBK di kawasan hutan lindung	10 lokasi				Jumlah Lokasi HHBK di kawasan hutan lindung	10 lokasi		



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
c	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu, dan/atau Jasa Lingkungan	Bone Soppeng tana Toraja	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	5.364.600.000	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu, dan/atau Jasa Lingkungan	Bone Soppeng tana Toraja	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	5.364.600.000	
4	Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara		Luas rehabilitasi lahan diluar kawasan hutan negara	1.571 ha	9.781.647.700	Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara		Luas rehabilitasi lahan diluar kawasan hutan negara	1.571 ha	9.781.647.700	
a	Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan	Enrekang Gowa jeneponto Pinrang Parepare Torut	Jumlah lokasi sumber benih unggul yang dikembangkan	4 lokasi	1.246.693.800	Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan	Enrekang Gowa jeneponto Pinrang Parepare Torut	Jumlah lokasi sumber benih unggul yang dikembangkan	4 lokasi	1.246.693.800	
			Jumlah bibit yang dihasilkan untuk rehabilitasi lahan	25.000 bibit				Jumlah bibit yang dihasilkan untuk rehabilitasi lahan	25.000 bibit		
b	Pembangunan Hutan Rakyat diluar Kawasan Hutan Negara	Bone Bulukumba Luwu Lutra Pangkep Pinrang takalar Wajo	Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	470 ha	4.356.726.400	Pembangunan Hutan Rakyat diluar Kawasan Hutan Negara	Bone Bulukumba Luwu Lutra Pangkep Pinrang takalar Wajo	Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	470 ha	4.356.726.400	
			Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	233 ha				Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	233 ha		
c	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Makassar	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Yang Disusun.	1 dokumen	43.765.000	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Makassar	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Yang Disusun.	1 dokumen	43.765.000	
d	Pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan.	Makassar	Jumlah laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	1 laporan	91.135.000	Pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan.	Makassar	Jumlah laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	1 laporan	91.135.000	
e	Pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara	Tana Toraja	Luas lahan yang di hijaukan di luar kawasan huta negara	230 ha	4.043.327.500	Pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara	Tana Toraja	Luas lahan yang di hijaukan di luar kawasan huta negara	230 ha	4.043.327.500	
5	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Persentase Jumlah Kasus Kerusakan Kawasan hutan yang tertangani	100%	2.288.412.000	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Persentase Jumlah Kasus Kerusakan Kawasan hutan yang tertangani	100%	2.288.412.000	
a	Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	Bulukumba Luwu Parepare Makassar palopo Lutim	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	424 orang	100.000.000	Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	Bulukumba Luwu Parepare Makassar palopo Lutim	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	424 orang	100.000.000	



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b	Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	Bantaeng Barru Bone Bulukumba Enrekang Gowa Jeneponto Luwu Lutra Maros Pangkep Pinrang Selayar Sidrap Sinjai Soppeng Takalar Tator Wajo Parepare Palopo Lutim Torut	Jumlah pelaksanaan patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	252 orang/kali /bulan/KPH	1.577.292.000	Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	Bantaeng Barru Bone Bulukumba Enrekang Gowa Jeneponto Luwu Lutra Maros Pangkep Pinrang Selayar Sidrap Sinjai Soppeng Takalar Tator Wajo Parepare Palopo Lutim Torut	Jumlah pelaksanaan patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	252 orang/kali /bulan/KPH	1.577.292.000	
			Jumlah papan bicara pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	57 unit				Jumlah papan bicara pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	57 unit		
c	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Bone Bulukumba Parepare Palopo	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan monitoring perlindungan hutan	23 laporan	522.300.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Bone Bulukumba Parepare Palopo	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan monitoring perlindungan hutan	23 laporan	522.300.000	
			Jumlah lokasi pelaksanaan operasi gabungan penanganan tindak pidana khusus kehutanan	2 lokasi				Jumlah lokasi pelaksanaan operasi gabungan penanganan tindak pidana khusus kehutanan	2 lokasi		
d	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan kebakaran Hutan dan lahan	Bantaeng Barru Bone Bulukumba Enrekang Gowa Jeneponto Luwu Lutra maros Pangkep Pinrang Selayar Sidrap sinjai Soppeng Takalar Tator Wajo Parapare palopo Lutim Torut	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan monitoring pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan	16 laporan	88.820.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan kebakaran Hutan dan lahan	Bantaeng Barru Bone Bulukumba Enrekang Gowa Jeneponto Luwu Lutra maros Pangkep Pinrang Selayar Sidrap sinjai Soppeng Takalar Tator Wajo Parapare palopo Lutim Torut	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan monitoring pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan	16 laporan	88.820.000	



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah laporan titik api (hot spot) yang dipantau dan dikendalikan	16 laporan				Jumlah laporan titik api (hot spot) yang dipantau dan dikendalikan	16 laporan		
6	Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Jenis HHBK yang diolah oleh pemegang izin	3 jenis	68.970.000	Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Jenis HHBK yang diolah oleh pemegang izin	3 jenis	68.970.000	
a	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati		Jumlah Produksi HHBK yang diolah oleh pemegang izin	49.187,134 ton		Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati		Jumlah Produksi HHBK yang diolah oleh pemegang izin	49.187,134 ton		
b	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Gowa Lutra Sidrap sinjai Tatot Torut	Jumlah komitmen izin fasilitasi penerbitan IUIPHHBK	5 izin	2.470.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Gowa Lutra Sidrap sinjai Tatot Torut	Jumlah komitmen izin fasilitasi penerbitan IUIPHHBK	5 izin	2.470.000	
c	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya		Luas areal budidaya HHBK	100 ha		Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya		Luas areal budidaya HHBK	100 ha		
d	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Enrekang Gowa Pinrang sinjai Tator Torut	Jumlah pemegang IUIPHHBK yang diawasi	5 izin	66.500.000	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Enrekang Gowa Pinrang sinjai Tator Torut	Jumlah pemegang IUIPHHBK yang diawasi	5 izin	66.500.000	
7	Kegiatan Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6.000 M3 per tahun		Jumlah data dan informasi nilai ekspor hasil hutan kayu	28.155,1717 ton	138.520.000	Kegiatan Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6.000 M3 per tahun		Jumlah data dan informasi nilai ekspor hasil hutan kayu	28.155,1717 ton	138.520.000	
a	Rencana pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/tahun	Gowa jeneponto Luwu Luwu Utara sinjai takalar Lutim	Jumlah industri yang aktif dan tertib aturan	60 industri	66.490.000	Rencana pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/tahun	Gowa jeneponto Luwu Luwu Utara sinjai takalar Lutim	Jumlah industri yang aktif dan tertib aturan	60 industri	66.490.000	
			Jumlah data produksi kayu olahan	3 laporan				Jumlah data produksi kayu olahan	3 laporan		
			Jumlah data asal usul rencana pemenuhan bahan baku	16 laporan				Jumlah data asal usul rencana pemenuhan bahan baku	16 laporan		
b	Pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6.000 M3 per tahun	Jeneponto luwu lutra sinjai takalar lutim	Jumlah data sebaran GANIS PHPL yang melaksanakan PUHH pada industry	40 orang	72.030.000	Pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6.000 M3 per tahun	Jeneponto luwu lutra sinjai takalar lutim	Jumlah data sebaran GANIS PHPL yang melaksanakan PUHH pada industry	40 orang	72.030.000	



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah data pemasaran hasil hutan kayu ndus dan ekspor	24 laporan				Jumlah data pemasaran hasil hutan kayu ndus dan ekspor	24 laporan		
			Jumlah ndustry yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi	60 industri				Jumlah ndustry yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi	60 industri		
8	Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan		Jumlah sertifikasi sumber benih, mutu benih, dan mutu bibit tanaman hutan	95 pemohon	263.350.000	Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan		Jumlah sertifikasi sumber benih, mutu benih, dan mutu bibit tanaman hutan	95 pemohon	263.350.000	
a	Penetapan pengadaan benih dan pengedar benih dan/ atau bibit terdaftar	Gowa jeneponto maros sinjai tator makassar torut	Jumlah pemohon pengada benih dan pengedar benih/bibit tanaman hutan terdaftar	15 pemohon	88.990.000	Penetapan pengadaan benih dan pengedar benih dan/ atau bibit terdaftar	Gowa jeneponto maros sinjai tator makassar torut	Jumlah pemohon pengada benih dan pengedar benih/bibit tanaman hutan terdaftar	15 pemohon	88.990.000	
			Jumlah calon sumber benih yang diidentifikasi	7 lokasi				Jumlah calon sumber benih yang diidentifikasi	7 lokasi		
b	Sertifikasi sumber benih	Bantaeng barru bone bulukumba enrekang gowa jeneponto luwu lutra maros pangkep pinrang selayar sidrap sinjai soppeng takalar tator wajo parepare palopo lutim torut	Jumlah pemohon sertifikasi sumber benih	7 pemohon	43.520.000	Sertifikasi sumber benih	Bantaeng barru bone bulukumba enrekang gowa jeneponto luwu lutra maros pangkep pinrang selayar sidrap sinjai soppeng takalar tator wajo parepare palopo lutim torut	Jumlah pemohon sertifikasi sumber benih	7 pemohon	43.520.000	
c	Sertifikasi mutu benih	Bantaeng barru bone bulukumba enrekang gowa jeneponto luwu lutra maros pangkep pinrang selayar sidrap sinjai soppeng takalar tator wajo	Jumlah pemohon sertifikasi mutu benih	15 pemohon		Sertifikasi mutu benih	Bantaeng barru bone bulukumba enrekang gowa jeneponto luwu lutra maros pangkep pinrang selayar sidrap sinjai soppeng takalar tator wajo	Jumlah pemohon sertifikasi mutu benih	15 pemohon		



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		parepare palopo torut lutim					parepare palopo torut lutim				
d	Sertifikasi mutu bibit		Jumlah pemohon sertifikasi mutu bibit	10 pemohon	44.670.000	Sertifikasi mutu bibit		Jumlah pemohon sertifikasi mutu bibit	10 pemohon	44.670.000	
e	Pengawasan peredaran benih dan/ atau bibit	Bantaeng bone gowa jeneponto luwu maros pangkep pinrang selayar sinjai soppeng takalar tator torut	Jumlah lokasi pengawasan peredaran benih dan/ atau bibit tanaman hutan	24 kab/kota	86.170.000	Pengawasan peredaran benih dan/ atau bibit	Bantaeng bone gowa jeneponto luwu maros pangkep pinrang selayar sinjai soppeng takalar tator torut	Jumlah lokasi pengawasan peredaran benih dan/ atau bibit tanaman hutan	24 kab/kota	86.170.000	
B	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEMNYA		Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata	2 jenis	99.879.200	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEMNYA		Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata	2 jenis	99.879.200	
1	Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah izin penangkar tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	100 penangkar	99.879.200	Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah izin penangkar tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	100 penangkar	99.879.200	
a	Pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES	Bone bulukumba parepare palopo	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES	1 laporan	99.879.200	Pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES	Bone bulukumba parepare palopo	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES	1 laporan	99.879.200	
C	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	16,25%	26.672.372.300	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	16,25%	26.672.372.300	
1	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan		Jumlah pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan	350 KTH	26.672.372.300	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan		Jumlah pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan	350 KTH	26.672.372.300	



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan			Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan			
a	Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan	Bantaeng barru bon bulukumba enrekang goa jeneponto luwu lutra maros pangkep pinrang selayar sidrap sinjai soppeng takalar tator wajo parepare makassar palopo lutim torut	Jumlah penyuluh kehutanan yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya	100 orang	278.990.000	Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan	Bantaeng barru bon bulukumba enrekang goa jeneponto luwu lutra maros pangkep pinrang selayar sidrap sinjai soppeng takalar tator wajo parepare makassar palopo lutim torut	Jumlah penyuluh kehutanan yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya	100 orang	278.990.000	
			Jumlah SDM Kehutanan yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya	200 orang				Jumlah SDM Kehutanan yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya	200 orang		
			Jumlah unit penyelenggara penyuluhan yang dimonitoring dan dievaluasi	16 unit penyelenggara				Jumlah unit penyelenggara penyuluhan yang dimonitoring dan dievaluasi	16 unit penyelenggara		
b	Penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan	Bantaeng barru bone bulukumba enrekang goa jeneponto luwu luwu utara maros pangkep pinrang selayar sidrap sinjai soppeng takalar tator wajo parepare makassar palopo lutim torut	Jumlah KTH yang naik kelas kemampuan	75 KTH	180.442.300	Penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan	Bantaeng barru bone bulukumba enrekang goa jeneponto luwu luwu utara maros pangkep pinrang selayar sidrap sinjai soppeng takalar tator wajo parepare makassar palopo lutim torut	Jumlah KTH yang naik kelas kemampuan	75 KTH	180.442.300	



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
c	Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial	Bantaeng baru bone bulukumba enrekag gowa jeneponto luwu lutra maros pangkep pinrang selayar sidrap sinjai soppeng takalar tator wajo parepare makassar palopo lutim torut	Jumlah peserta sosialisasi/ Rapat Koordinasi perhutanan sosial	300 orang	26.212.940.000	Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial	Bantaeng baru bone bulukumba enrekag gowa jeneponto luwu lutra maros pangkep pinrang selayar sidrap sinjai soppeng takalar tator wajo parepare makassar palopo lutim torut	Jumlah peserta sosialisasi/ Rapat Koordinasi perhutanan sosial	300 orang	26.212.940.000	
			Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	130 kelompok tani/ KTH				Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	130 kelompok tani/ KTH		
			Jumlah dokumen kegiatan pokja percepatan perhutanan sosial yang disusun	2 dokumen				Jumlah dokumen kegiatan pokja percepatan perhutanan sosial yang disusun	2 dokumen		
			Jumlah laporan konflik tenurial PS yang difasilitasi penyelesaiannya	2 laporan				Jumlah laporan konflik tenurial PS yang difasilitasi penyelesaiannya	2 laporan		
			Jumlah produk KUPS yang dipromosikan	10 produk				Jumlah produk KUPS yang dipromosikan	10 produk		
D	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		Jumlah DAS yang direhabilitasi	2 DAS	5.409.106.640	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		Jumlah DAS yang direhabilitasi	2 DAS	5.409.106.640	
1	Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah DAS yang dikelola di Provinsi Sulawesi Selatan	2 DAS	5.409.106.640	Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah DAS yang dikelola di Provinsi Sulawesi Selatan	2 DAS	5.409.106.640	
a	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS	Bantaeng baru bone bulukumba enrekag gowa jeneponto luwu lutra maros pangkep pinrang	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang disusun	2 dokumen	75.000.000	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS	Bantaeng baru bone bulukumba enrekag gowa jeneponto luwu lutra maros pangkep pinrang	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang disusun	2 dokumen	75.000.000	



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		selayar sidrap sinjai soppeng taklar tator wajo parepare palopo lutim torut					selayar sidrap sinjai soppeng taklar tator wajo parepare palopo lutim torut				
b	Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS		Jumlah DAS yang dioptimalisasikan fungsi dan daya dukungnya	2 DAS		Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS		Jumlah DAS yang dioptimalisasikan fungsi dan daya dukungnya	2 DAS		
c	Penerapan teknik konservasi tanah dan air di wilayah DAS	Bantaeng barru bone bulukumba enrekang gowa jeneponto luwu lutra maros pangkep pinrang selayar sidrap sinjai soppeng takalar tator wajo parepare palopo lutim torut	Jumlah unit dam penahan	80 unit	5.090.327.240	Penerapan teknik konservasi tanah dan air di wilayah DAS	Bantaeng barru bone bulukumba enrekang gowa jeneponto luwu lutra maros pangkep pinrang selayar sidrap sinjai soppeng takalar tator wajo parepare palopo lutim torut	Jumlah unit dam penahan	80 unit	5.090.327.240	
			Jumlah unit gully plug	90 unit				Jumlah unit gully plug	90 unit		
			Jumlah unit sumur resapan	80 unit				Jumlah unit sumur resapan	80 unit		
d	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Makassar	Jumlah masyarakat dan pihak terkait yang hadir dan berpartisipasi pada kegiatan penanaman	250 orang	100.000.000	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Makassar	Jumlah masyarakat dan pihak terkait yang hadir dan berpartisipasi pada kegiatan penanaman	250 orang	100.000.000	
e	Pengembangan Kelembagaan pengelolaan DAS	Makassar	Jumlah pertemuan rapat yang dilaksanakan	4 kali	91.024.400	Pengembangan Kelembagaan pengelolaan DAS	Makassar	Jumlah pertemuan rapat yang dilaksanakan	4 kali	91.024.400	
f	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	Makassar	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	1 laporan	52.755.000	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	Makassar	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	1 laporan	52.755.000	
E	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	105.257.838.666	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	105.257.838.666	



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%				Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%		
			Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP (%)	100%				Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP (%)	100%		
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100%	2.318.114.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100%	2.318.114.000	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah	2 dokumen	1.772.908.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah	2 dokumen	1.772.908.800	
b	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Makassar	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	111.881.400	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Makassar	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	111.881.400	
c	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	81.453.200	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	81.453.200	
d	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	2.400.000	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	2.400.000	
e	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	4.800.000	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	4.800.000	
f	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Makassar	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	2 dokumen	90.236.200	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Makassar	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	2 dokumen	90.236.200	
g	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Makassar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	2 dokumen	254.434.400	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Makassar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	2 dokumen	254.434.400	
			Jumlah laporan data dan informasi yang dikumpulkan dan dipublikasikan	2 laporan				Jumlah laporan data dan informasi yang dikumpulkan dan dipublikasikan	2 laporan		
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	90.766.518.870	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	90.766.518.870	
a	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Makassar	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji, tunjangan dan TPP	843 orang	90.452.867.870	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Makassar	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji, tunjangan dan TPP	843 orang	90.452.867.870	



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Makassar	Jumlah aparat SKPD yang dikelola administrasi kepegawaianya	843 orang		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Makassar	Jumlah aparat SKPD yang dikelola administrasi kepegawaianya	843 orang		
			Jumlah administrasi yang disusun	1 laporan				Jumlah administrasi yang disusun	1 laporan		
c	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Makassar	Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi	50 dokumen		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Makassar	Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi	50 dokumen		
d	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Makassar	Jumlah pelaporan pelaksanaan akuntansi SKPD	2 laporan	10.000.000	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Makassar	Jumlah pelaporan pelaksanaan akuntansi SKPD	2 laporan	10.000.000	
e	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Makassar	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 laporan	104.520.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Makassar	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 laporan	104.520.000	
f	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	1 laporan	104.880.000	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	1 laporan	104.880.000	
g	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD	Makassar	Jumlah pelaporan keuangan yang tersusun	18 laporan	91.765.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD	Makassar	Jumlah pelaporan keuangan yang tersusun	18 laporan	91.765.000	
h	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Makassar	Jumlah pelaporan prognosis yang tersusun	2 laporan	2.486.000	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Makassar	Jumlah pelaporan prognosis yang tersusun	2 laporan	2.486.000	
2	Kegiatan Administarsi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Jumlah Penyusunan dokumen laporan barang milik daerah	2 dokumen	49.503.000	Kegiatan Administarsi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Jumlah Penyusunan dokumen laporan barang milik daerah	2 dokumen	49.503.000	
a	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Makassar	Jumlah laporan penilaian barang milik daerah SKPD	1 laporan	44.555.000	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Makassar	Jumlah laporan penilaian barang milik daerah SKPD	1 laporan	44.555.000	
b	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Makassar	Jumlah laporan penyusunan barang milik daerah SKPD	1 laporan		Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Makassar	Jumlah laporan penyusunan barang milik daerah SKPD	1 laporan		
c	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Makassar	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	1 laporan	4.948.000	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Makassar	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	1 laporan	4.948.000	
3	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Pendapatan Daerah (Rp)	Rp. 1.712.430.000	180.815.000	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Pendapatan Daerah (Rp)	Rp. 1.712.430.000	180.815.000	
a	Perencanaan pengelolaan retribusi daerah	Makassar	Jumlah laporan perencanaan	1 laporan	5.000.000	Perencanaan pengelolaan retribusi daerah	Makassar	Jumlah laporan perencanaan	1 laporan	5.000.000	



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pengelolaan retribusi daerah					pengelolaan retribusi daerah			
b	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Makassar	Jumlah kebijakan retribusi daerah yang disebarluaskan	1 laporan	78.420.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Makassar	Jumlah kebijakan retribusi daerah yang disebarluaskan	1 laporan	78.420.000	
c	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Makassar	Jumlah laporan objek retribusi daerah	1 laporan	97.395.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Makassar	Jumlah laporan objek retribusi daerah	1 laporan	97.395.000	
d	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Makassar	Jumlah laporan data retribusi daerah	1 laporan		Pengolahan Data Retribusi Daerah	Makassar	Jumlah laporan data retribusi daerah	1 laporan		
e	Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Makassar	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	1 laporan		Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Makassar	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	1 laporan		
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	90	178.790.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	90	178.790.000	
a	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Makassar	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan	809 orang		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Makassar	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan	809 orang		
			Jumlah pakaian lapangan yang diadakan	319 orang				Jumlah pakaian lapangan yang diadakan	319 orang		
			Jumlah pakaian korpri yang diadakan	809 orang				Jumlah pakaian korpri yang diadakan	809 orang		
			Jumlah pakaian batik khas daerah yang diadakan	809 orang				Jumlah pakaian batik khas daerah yang diadakan	809 orang		
			Jumlah pakaian olahraga dan perlengkapannya yang diadakan	809 orang				Jumlah pakaian olahraga dan perlengkapannya yang diadakan	809 orang		
B	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Makassar	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang diadakan	1 laporan	88.760.000	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Makassar	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang diadakan	1 laporan	88.760.000	
c	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Makassar	Jumlah laporan sistem informasi kepegawaian	1 laporan		Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Makassar	Jumlah laporan sistem informasi kepegawaian	1 laporan		
d	Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Makassar	Jumlah laporan hasil evaluasi penilaian kinerja pegawai	1 laporan	90.030.000	Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Makassar	Jumlah laporan hasil evaluasi penilaian kinerja pegawai	1 laporan	90.030.000	
E	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Makassar	Jumlah aparat SKPD yang mengikuti	100 orang		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Makassar	Jumlah aparat SKPD yang mengikuti	100 orang		



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pendidikan dan pelatihan					pendidikan dan pelatihan			
f	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Makassar	Jumlah sosialisasi peraturan Perundang-undangan	100 orang		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Makassar	Jumlah sosialisasi peraturan Perundang-undangan	100 orang		
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100%	1.216.410.900	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100%	1.216.410.900	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Makassar	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	26 unit	30.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Makassar	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	26 unit	30.000.000	
b	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Makassar	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	300 unit		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Makassar	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	300 unit		
c	Penyediaan peralatan rumah tangga	Makassar	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	10 jenis	20.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Makassar	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	10 jenis	20.000.000	
d	Penyediaan bahan logistik kantor	Makassar	Jumlah paket bahan logistik kantor yang tersedia	27 paket	345.125.900	Penyediaan bahan logistik kantor	Makassar	Jumlah paket bahan logistik kantor yang tersedia	27 paket	345.125.900	
e	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Makassar	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	130.150.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Makassar	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	130.150.000	
f	Fasilitasi kunjungan tamu	Makassar	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 tahun	50.400.000	Fasilitasi kunjungan tamu	Makassar	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 tahun	50.400.000	
g	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Makassar	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150 laporan	602.850.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Makassar	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150 laporan	602.850.000	
h	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Makassar	Jumlah arsip dinamis SKPD yang tertata	50 arsip	37.885.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Makassar	Jumlah arsip dinamis SKPD yang tertata	50 arsip	37.885.000	
i	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Makassar	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD yang tersedia	3 sistem		Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Makassar	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD yang tersedia	3 sistem		
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	703.348.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	703.348.000	
a	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan	1 unit		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan	1 unit		



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Jumlah pengadaan kendaraan operasional dinas	1 unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Jumlah pengadaan kendaraan operasional dinas	1 unit		
c	Pengadaan mebel	Makassar	Jumlah lemari arsip yang tersedia	60 unit		Pengadaan mebel	Makassar	Jumlah lemari arsip yang tersedia	60 unit		
			Jumlah meja kerja pejabat eselon/staf yang tersedia	100 unit				Jumlah meja kerja pejabat eselon/staf yang tersedia	100 unit		
			Jumlah kursi kerja pejabat eselon/staf yang tersedia	100 unit				Jumlah kursi kerja pejabat eselon/staf yang tersedia	100 unit		
d	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	1 unit		Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	1 unit		
e	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	132 unit	628.348.000	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	132 unit	628.348.000	
f	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	3 unit	75.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	3 unit	75.000.000	
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	8.723.826.896	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	8.723.826.896	
a	Penyediaan jasa surat menyurat	Makassar	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	1 tahun	4.992.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Makassar	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	1 tahun	4.992.000	
b	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Makassar	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	1 tahun	603.184.200	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Makassar	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	1 tahun	603.184.200	
c	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Makassar	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 tahun	49.940.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Makassar	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 tahun	49.940.000	
d	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Makassar	Jumlah jasa tenaga non PNS	377 orang	8.065.710.696	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Makassar	Jumlah jasa tenaga non PNS	377 orang	8.065.710.696	
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%	1.120.512.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%	1.120.512.000	
a	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Makassar	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	1 unit	107.160.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Makassar	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	1 unit	107.160.000	



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah biaya pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	1 unit				Jumlah biaya pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	1 unit		
			Jumlah pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan roda 4	1 unit				Jumlah pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan roda 4	1 unit		
b	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Makassar	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	43 unit	728.352.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Makassar	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	43 unit	728.352.000	
			Jumlah biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	43 unit				Jumlah biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	43 unit		
			Jumlah pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 4	39 unit				Jumlah pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 4	39 unit		
			Jumlah pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 2	382 unit				Jumlah pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 2	382 unit		
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	10 unit	70.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	10 unit	70.000.000	
d	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Jumlah aset tak berwujud yang di pelihara	5 unit	10.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Jumlah aset tak berwujud yang di pelihara	5 unit	10.000.000	
e	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Makassar	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	105.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Makassar	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	105.000.000	
f	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 tahun	50.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 tahun	50.000.000	
g	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 tahun	50.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 tahun	50.000.000	
Total					Rp. 155.681.166.506	Total					Rp. 155.681.166.506





BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan perubahan tahun 2022 memuat program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian sasaran Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022, serta mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintah daerah bidang kehutanan.

Rencana kerja program dan kegiatan prioritas Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang mendukung prioritas provinsi pada perubahan rencana kerja tahun 2022, sebagai berikut :



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

Tabel 6

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

Kode	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)					Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana			Kelompok sasaran	Sumber Dana
	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
						Urusan Pilihan													
						Bidang Kehutanan													
						PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi						65,47%	65,47%	21.885.825.478	18.241.969.700	(3.643.855.778)		
							Persentase kerusakan hutan						14,82%	14,82%					
							Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan						92.336,62 m ³	92.336,62 m ³					
							Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu						283 ton	283 ton					
						Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan KPH Kewenangan Provinsi	Luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya						1.780.029 ha	1.780.029 ha	730.000.000	201.130.000	(528.870.000)		APBD
						Penyusunan rancang bangun tata hutan wilayah KPH	Jumlah dokumen rancang bangun KPH				Bantaeng Bone Maros Soppeng Makassar	Bantaeng Bone Maros Soppeng Makassar	4 dokumen	2 dokumen	100.000.000	100.000.000	0	Pemerintah,	
						Pembagian blok/petak pengelolaan hutan KPH	Jumlah patok batas blok dan petak				Sulsel	Sulsel	748 buah	748 buah	300.000.000	0	(300.000.000)	Pemerintah, masyarakat	APBD
							Panjang penataan batas blok dan petak				Sulsel	Sulsel	150 km	150 km					
						Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah jenis sarana prasarana operasionalisasi KPH				Makassar	Makassar	3 jenis	3 jenis	80.000.000	0	(80.000.000)	Pemerintah	APBD
						Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Luas Wilayah yang diusulkan untuk perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan				Bantaeng Barru Bone Bulukumba Enrekang Gowa jenepono Luwu Lutra Maros Pangkep Pinrang Selayar Sidrap Sinjai Soppeng Takalar Tator Wajo Parepare Palopo Lutim Torut	Bantaeng Barru Bone Bulukumba Enrekang Gowa jenepono Luwu Lutra Maros Pangkep Pinrang Selayar Sidrap Sinjai Soppeng Takalar Tator Wajo Parepare Palopo Lutim Torut	500 ha	500 ha	250.000.000	101.130.000	(148.870.000)	Pemerintah, masyarakat	APBD
						Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencanan Pengelolaan KPH						24 dokumen	24 dokumen	1.500.000.000	0	(1.500.000.000)		APBD



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

Kode						Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Lokasi	Lokasi	Target Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana			Kelompok sasaran	Sumber Dana
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
						Penyusunan rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP KPH	Penyusunan rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP KPH	Gowa, Jeneponto Bantaeng, Snjai Selayar, Maros sidrap Pinrang Tator Torut Luwu Lutim Lutra Wajo Soppeng Barru	Gowa, Jeneponto Bantaeng, Snjai Selayar, Maros sidrap Pinrang Tator Torut Luwu Lutim Lutra Wajo Soppeng Barru	18 dokumen	18 dokumen	1.500.000.000	0	(1.500.000.000)	Pemerintah , Swatsa, Masyarakat	APBD
							Jumlah dokumen RPHJPD		Jumlah dokumen RPHJPD			7 dokumen	7 dokumen					
						Kegiatan Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah penerimaan dari sektor kehutanan	Kegiatan Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah penerimaan dari sektor kehutanan			Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	655.120.000	5.499.940.000	4.844.820.000		APBD
						Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi	Luas areal pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di kawasan hutan produksi	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi	Luas areal pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di kawasan hutan produksi	Enrekang Gowa Pinrang Sinjai tator	Enrekang Gowa Pinrang Sinjai tator	110.425,79 ha	110.425,79 ha	75.120.000	67.000.000	(8.120.000)	Pemerintah , Swatsa, Masyarakat	APBD
							Jumlah izin wajib bayar yang membayar iuran PSDH di hutan produksi		Jumlah izin wajib bayar yang membayar iuran PSDH di hutan produksi			80 izin	60 izin					
							Jumlah produksi HHBK di kawasan hutan produksi		Jumlah produksi HHBK di kawasan hutan produksi			3.041,94 ton	3.041,94 ton					
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Lokasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di kawasan hutan lindung	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Lokasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di kawasan hutan lindung	Enrekang Gowa Pinrang Sinjai Tator	Enrekang Gowa Pinrang Sinjai Tator	16 lokasi	10 lokasi	80.000.000	68.340.000	(11.660.000)	Pemerintah , Swatsa, Masyarakat	APBD
							Jumlah Lokasi wajib bayar yang membayar iuran PSDH di hutan lindung		Jumlah Lokasi wajib bayar yang membayar iuran PSDH di hutan lindung			16 lokasi	10 lokasi					
							Jumlah Lokasi produksi HHBK di kawasan hutan lindung		Jumlah Lokasi produksi HHBK di kawasan hutan lindung			16 lokasi	10 lokasi					
						Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu, dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu, dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	Bone Soppeng tana Toraja	Bone Soppeng tana Toraja	1 lokasi	1 lokasi	500.000.000	5.364.600.000	4.864.600.000	Pemerintah , Swatsa, Masyarakat	APBD
						Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	Luas rehabilitasi lahan diluar kawasan hutan negara	Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	Luas rehabilitasi lahan diluar kawasan hutan negara			1.571 ha	1.571 ha	15.757.599.478	9.781.647.700	(5.975.951.778)		APBD
						Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah lokasi sumber benih unggul yang dikembangkan	Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah lokasi sumber benih unggul yang dikembangkan	Enrekang Gowa jeneponto Pinrang Parepare Torut	Enrekang Gowa jeneponto Pinrang Parepare Torut	5 lokasi	4 lokasi	700.000.000	1.246.693.800	546.693.800	Pemerintah , Swatsa, Masyarakat	APBD
							Jumlah unit persemaian		Jumlah bibit yang dihasilkan untuk rehabilitasi lahan			11 lokasi	25.000 bibit					



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

Kode						Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Lokasi	Lokasi	Target Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana			Kelompok sasaran	Sumber Dana
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
						Pembangunan Hutan Rakyat diluar Kawasan Hutan Negara	Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	Pembangunan Hutan Rakyat diluar Kawasan Hutan Negara	Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	Bone Bulukumba Luwu Lutra Pangkep Pinrang takalar Wajo	Bone Bulukumba Luwu Lutra Pangkep Pinrang takalar Wajo	233 ha	470 ha	2.328.083.500	4.356.726.400	2.028.642.900	Pemerintah , Masyarakat	APBD
							Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat		Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat			233 ha	233 ha					
						Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Yang Disusun.	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Yang Disusun.	Makassar	Makassar	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	43.765.000	(6.235.000)	Pemerintah , Swatsa, Masyarakat	APBD
						Pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan.	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan atau pengawasan rehabilitasi lahan	Pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan.	Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	Makassar	Makassar	30 kali	1 laporam	185.260.000	91.135.000	(94.125.000)	Pemerintah , Swatsa, Masyarakat	APBD
							Jumlah pelaksanaan pendampingan dan bimbingan teknis					15 kali	-					
						Pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara	Luas lahan penghijauan lingkungan diluar kawasan hutan negara	Pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara	Luas lahan penghijauan lingkungan diluar kawasan hutan negara	Tana Toraja	Tana Toraja	10 ha	230 ha	12.494.255.978	4.043.327.500	(8.450.928.478)	Pemerintah , Masyarakat	APBD
						Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase Jumlah Kasus Kerusakan Kawasan hutan yang tertangani	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase Jumlah Kasus Kerusakan Kawasan hutan yang tertangani			100%	100%	2.508.976.000	2.288.412.000	(220.564.000)		APBD
						Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	Bulukumba Luwu Parepare Makassar palopo Lutim	Bulukumba Luwu Parepare Makassar palopo Lutim	424 orang	424orang	799.836.000	100.000.000	(699.836.000)	Pemerintah , Masyarakat	APBD
							Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan					30 orang						
						Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	Jumlah pelaksanaan patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	Jumlah pelaksanaan patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	Bantaeng Barru Bone Bulukumba Enrekang Gowa jenepono Luwu Lutra Maros Pangkep Pinrang Selayar Sidrap Sinjai Soppeng Takalar Tator Wajo Parepare Palopo Lutim Torut	Bantaeng Barru Bone Bulukumba Enrekang Gowa jenepono Luwu Lutra Maros Pangkep Pinrang Selayar Sidrap Sinjai Soppeng Takalar Tator Wajo Parepare Palopo Lutim Torut	768 kali patroli (48 kali/KPH)	252 orang/kali/bulan/KPH	1.370.880.000	1.577.292.000	206.412.000	Pemerintah , Masyarakat	APBD
							Jumlah papan bicara pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan		Jumlah papan bicara pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan			5 unit/KPH	57 unit					
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan monitoring perlindungan hutan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi sinkronisasi dan monitoring perlindungan hutan	Bone Bulukumba Parepare Palopo	Bone Bulukumba Parepare Palopo	288 kali	23 laporan	238.630.000	522.300.000	283.670.000	Pemerintah ,	APBD
							Jumlah lokasi pelaksanaan operasi gabungan		Jumlah lokasi pelaksanaan operasi gabungan penanganan			1 lokasi	2 lokasi					



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

Kode						Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Lokasi	Lokasi	Target Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana			Kelompok sasaran	Sumber Dana
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
							penanganan tindak pidana khusus kehutanan		tindak pidana khusus kehutanan									
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan kebakaran Hutan dan lahan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan monitoring pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan kebakaran Hutan dan lahan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi sinkronisasi dan monitoring pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan	Bantaeng Barru Bone Bulukumba Enrekang Gowa Jeneponto Luwu Lutra maros Pangkep Pinrang Selayar Sidrap sinjai Soppeng Takalar Tator Wajo Parapare palopo Lutim Torut	Bantaeng Barru Bone Bulukumba Enrekang Gowa Jeneponto Luwu Lutra maros Pangkep Pinrang Selayar Sidrap sinjai Soppeng Takalar Tator Wajo Parapare palopo Lutim Torut	12 kali	16 laporan	99.630.000	88.820.000	(10.810.000)	Pemerintah , Swatsa, Masyarakat	APBD
							Jumlah laporan titik api (hot spot) yang dipantau dan dikendalikan		Jumlah laporan titik api (hot spot) yang dipantau dan dikendalikan			16 laporan	16 laporan					
						Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jenis HHBK yang diolah oleh pemegang izin	Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jenis HHBK yang diolah oleh pemegang izin			3 jenis	3 jenis	227.500.000	68.970.000	(158.530.000)		APBD
						Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah Produksi HHBK yang diolah oleh pemegang izin	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah Produksi HHBK yang diolah oleh pemegang izin			49.187,134 ton	49.187,134 ton	75.000.000		(75.000.000)	Pemerintah , Swatsa, Masyarakat	APBD
						Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah komitmen izin fasilitasi penerbitan IUIPHHBK	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah komitmen izin fasilitasi penerbitan IUIPHHBK	Gowa Lutra Sidrap sinjai Tator Torut	Gowa Lutra Sidrap sinjai Tator Torut	5 izin	5 izin	2.500.000	2.470.000	(30.000)	Pemerintah , Swatsa, Masyarakat	APBD
						Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luas areal budidaya HHBK	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luas areal budidaya HHBK			100 ha	100 ha	75.000.000		(75.000.000)	Pemerintah , Masyarakat	APBD
						Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah pemegang IUIPHHBK yang diawasi	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah pemegang IUIPHHBK yang diawasi	Enrekang Gowa Pinrang sinjai Tator Torut	Enrekang Gowa Pinrang sinjai Tator Torut	5 izin	5 izin	75.000.000	66.500.000	(8.500.000)	Pemerintah , Swatsa, Masyarakat	APBD
						Kegiatan Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6.000 M3 per tahun	Jumlah data dan informasi nilai ekspor hasil hutan kayu	Kegiatan Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6.000 M3 per tahun	Jumlah data dan informasi nilai ekspor hasil hutan kayu			28.155,1717 ton	28.155,1717 ton	155.170.000	138.520.000	(16.650.000)		APBD
						Rencana pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/tahun	Jumlah industri yang aktif dan tertib aturan	Rencana pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/tahun	Jumlah industri yang aktif dan tertib aturan	Gowa jeneponto Luwu Luwu Utara sinjai takalar Lutim	Gowa jeneponto Luwu Luwu Utara sinjai takalar Lutim	60 industri	60 industri	75.000.000	66.490.000	(8.510.000)	Pemerintah , Swatsa, Masyarakat	APBD
							Jumlah data produksi kayu olahan		Jumlah data produksi kayu olahan			3 laporan	3 laporan					
							Jumlah data asal usul rencana pemenuhan bahan baku		Jumlah data asal usul rencana pemenuhan bahan baku			16 laporan	16 laporan					



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

Kode						Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Lokasi	Lokasi	Target Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana			Kelompok sasaran	Sumber Dana
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
						Pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6.000 M3 per tahun	Jumlah data sebaran GANIS PHPL yang melaksanakan PUHH pada industry	Pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6.000 M3 per tahun	Jumlah data sebaran GANIS PHPL yang melaksanakan PUHH pada industry	Jenepono luwu lutra sinjai takalar lutim	Jenepono luwu lutra sinjai takalar lutim	40 orang	40 orang	80.170.000	72.030.000	(8.140.000)	Pemerintah , Swatsa,	APBD
							Jumlah data pemasaran hasil hutan kayu ndus dan ekspor		Jumlah data pemasaran hasil hutan kayu ndus dan ekspor			24 laporan	24 laporan					
							Jumlah ndustry yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi		Jumlah ndustry yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi			60 industri	60 industri					
						Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah sertifikasi sumber benih, mutu benih, dan mutu bibit tanaman hutan	Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah sertifikasi sumber benih, mutu benih, dan mutu bibit tanaman hutan			95 pemohon	95 pemohon	351.460.000	263.350.000	(88.110.000)	Pemerintah , Swatsa, Masyarakat	APBD
						Penetapan pengadaan benih dan pengedar benih dan/ atau bibit terdaftar	Jumlah pemohon pengada benih dan pengedar benih/bibit tanaman hutan terdaftar	Penetapan pengadaan benih dan pengedar benih dan/ atau bibit terdaftar	Jumlah pemohon pengada benih dan pengedar benih/bibit tanaman hutan terdaftar	Gowa jenepono maros sinjai tator makassar torut	Gowa jenepono maros sinjai tator makassar torut	36 pemohon	15 pemohon	100.000.000	88.990.000	(11.010.000)	Pemerintah , Swatsa, Masyarakat	APBD
							Jumlah calon sumber benih yang diidentifikasi		Jumlah calon sumber benih yang diidentifikasi			15 lokasi	7 lokasi				Pemerintah , Swatsa, Masyarakat	
						Sertifikasi sumber benih	Jumlah pemohon sertifikasi sumber benih	Sertifikasi sumber benih	Jumlah pemohon sertifikasi sumber benih	Bantaeng barru bone bulukumba enrekang gowa jenepono luwu lutra maros pangkep pinrang selayar sidrap sinjai soppeng takalar tator wajo parepare palopo lutim torut	Bantaeng barru bone bulukumba enrekang gowa jenepono luwu lutra maros pangkep pinrang selayar sidrap sinjai soppeng takalar tator wajo parepare palopo lutim torut	30 pemohon	7 pemohon	50.340.000	43.520.000	(6.820.000)	Pemerintah , Swatsa, Masyarakat	APBD
						Sertifikasi mutu benih	Jumlah pemohon sertifikasi mutu benih	Sertifikasi mutu benih	Jumlah pemohon sertifikasi mutu benih	Bantaeng barru bone bulukumba enrekang gowa jenepono luwu lutra maros pangkep pinrang selayar sidrap sinjai soppeng takalar tator wajo parepare palopo torut lutim	Bantaeng barru bone bulukumba enrekang gowa jenepono luwu lutra maros pangkep pinrang selayar sidrap sinjai soppeng takalar tator wajo parepare palopo torut lutim	15 pemohon	15 pemohon	50.340.000		(50.340.000)	Pemerintah , Swatsa, Masyarakat	APBD
						Sertifikasi mutu bibit	Jumlah pemohon sertifikasi mutu bibit	Sertifikasi mutu bibit	Jumlah pemohon sertifikasi mutu bibit			50 pemohon	10 pemohon	50.000.000	44.670.000	(5.330.000)	Pemerintah , Swatsa, Masyarakat	APBD
						Pengawasan peredaran benih dan/ atau bibit	Jumlah lokasi pengawasan peredaran benih dan/ atau bibit tanaman hutan	Pengawasan peredaran benih dan/ atau bibit	Jumlah lokasi pengawasan peredaran benih dan/ atau bibit tanaman hutan	Bantaeng bone gowa jenepono luwu maros pangkep pinrang selayar sinjai soppeng takalar tator torut	Bantaeng bone gowa jenepono luwu maros pangkep pinrang selayar sinjai soppeng takalar tator torut	24 kab/kota	24 kab/kota	100.780.000	86.170.000	(14.610.000)		APBD
						PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEMNYA	Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA	Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau			6 jenis	6 jenis	393.758.000	99.879.200	(293.878.800)	Pemerintah , Swatsa, Masyarakat	APBD



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

Kode	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)		Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)		Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana			Kelompok sasaran	Sumber Dana
	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
						Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah izin penangkar tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah izin penangkar tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi			100 penangkar	100 penangkar	393.758.000	99.879.200	(293.878.800)			Pemerintah , Swatsa, Masyarakat	APBD
						Pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES	Jumlah peserta sosialisasi tata cara perizinan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES	Bone bulukumba parepare palopo	Bone bulukumba parepare palopo	200 orang	1 laporan	393.758.000	99.879.200	(293.878.800)			Pemerintah , Swatsa, Masyarakat	APBD
							Jumlah laporan monitoring pengendalian dan pengawasan penangkar tumbuhan satwa liar yang tidak dilindungi					1 laporan								
						PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan			16,55%	16,55%	8.400.101.500	26.672.372.300	18.272.270.800			Pemerintah , Swatsa, Masyarakat	APBD
						Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan			350 KTH/KUPS	350 KTH/ KUPS	8.400.101.500	26.672.372.300	18.272.270.800			Pemerintah , Swatsa, Masyarakat	APBD
						Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan	Jumlah penyuluh kehutanan yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya	Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan	Jumlah penyuluh kehutanan yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya	Bantaeng barru bon bulukumba enrekang gowa jeneponto luwu lutra maros pangkep pinrang selayar sidrap sinjai soppeng takalar tator wajo parepare makassar palopo lutim torut	Bantaeng barru bon bulukumba enrekang gowa jeneponto luwu lutra maros pangkep pinrang selayar sidrap sinjai soppeng takalar tator wajo parepare makassar palopo lutim torut	100 orang	100 orang	200.000.000	278.990.000	78.990.000			Pemerintah , Swatsa, Masyarakat	APBD
							Jumlah SDM Kehutanan yang ditingkatkan		Jumlah SDM Kehutanan yang			200 orang	200 orang							



61 | B a b | | |



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

Kode						Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Lokasi	Lokasi	Target Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana			Kelompok sasaran	Sumber Dana
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
						DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)										
						Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola di Provinsi Sulawesi Selatan	Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola di Provinsi Sulawesi Selatan			2 DAS	2 DAS	2.725.940.000	5.409.106.640	2.683.166.640		APBD
						Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang disusun	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang disusun	Bantaeng baru bone bulukumba enrekang gowa jeneponto luwu lutra maros pangkep pinrang selayar sidrap sinjai soppeng taklar tator wajo parepare palopo lutim torut	Bantaeng baru bone bulukumba enrekang gowa jeneponto luwu lutra maros pangkep pinrang selayar sidrap sinjai soppeng taklar tator wajo parepare palopo lutim torut	2 dokumen	2 dokumen	75.000.000	75.000.000	0	Pemerintah , Swatsa, Masyarakat	APBD
						Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Jumlah DAS yang dioptimalisasikan fungsi dan daya dukungnya	Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Jumlah DAS yang dioptimalisasikan fungsi dan daya dukungnya			2 DAS	2 DAS	100.000.000		(100.000.000)	Pemerintah , Swatsa, Masyarakat	APBD
						Penerapan teknik konservasi tanah dan air di wilayah DAS	Jumlah unit dam penahan	Penerapan teknik konservasi tanah dan air di wilayah DAS	Jumlah unit dam penahan	Bantaeng baru bone bulukumba enrekang gowa jeneponto luwu lutra maros pangkep pinrang selayar sidrap sinjai soppeng taklar tator wajo parepare palopo lutim torut	Bantaeng baru bone bulukumba enrekang gowa jeneponto luwu lutra maros pangkep pinrang selayar sidrap sinjai soppeng taklar tator wajo parepare palopo lutim torut	34 unit	80 unit	2.103.815.000	5.090.327.240	2.986.512.240	Pemerintah , Swatsa, Masyarakat	APBD
							Jumlah unit gully plug		Jumlah unit gully plug			22 unit	90 unit					
							Jumlah unit sumur resapan		Jumlah unit sumur resapan			80 unit	80 unit					
						Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah masyarakat dan pihak terkait yang hadir dan berpartisipasi pada kegiatan penanaman	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah orang yang mengikuti pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS	Makassar	Makassar	250 orang	250 orang	100.000.000	100.000.000		Pemerintah , Masyarakat	APBD
						Pengembangan Kelembagaan pengelolaan DAS	Jumlah pertemuan rapat yang dilaksanakan	Pengembangan Kelembagaan pengelolaan DAS	Jumlah pertemuan rapat yang dilaksanakan	Makasar	Makasar	4 kali	4 kali	100.000.000	91.024.400	(8.975.600)	Pemerintah , Swatsa, Masyarakat	APBD
						Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	Jumlah koordinasi yang dilakukan	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	Makassar	Makassar	1 tahun	1 tahun	247.125.000	52.755.000	(194.370.000)	Pemerintah , Swatsa, Masyarakat	APBD
							Jumlah pertemuan atau rapat yang dilaksanakan		Jumlah pertemuan atau rapat yang dilaksanakan			4 kali	4 kali					
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah			100%	100%	126.867.201.741	105.257.838.666	(21.609.363.075)		APBD

63 | B a b I I I



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

Kode						Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Lokasi	Lokasi	Target Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana			Kelompok sasaran	Sumber Dana
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
						Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Makassar	Makassar	1 laporan	1 laporan	116.155.000	104.520.000	(11.635.000)	Pemerintah	APBD
						Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Makassar	Makassar	1 laporan	1 laporan	42.940.000	104.880.000	61.940.000	Pemerintah	APBD
						Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD	Jumlah pelaporan keuangan yang tersusun	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD	Jumlah pelaporan keuangan yang tersusun	Makassar	Makassar	18 laporan	18 laporan	142.375.000	91.765.000	(50.610.000)	Pemerintah	APBD
						Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah pelaporan prognosis yang tersusun	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah pelaporan prognosis yang tersusun	Makassar	Makassar	2 laporan	2 laporan	2.500.000	2.486.000	(14.000)	Pemerintah	APBD
						Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan dokumen laporan barang milik daerah	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan dokumen laporan barang milik daerah			2 dokumen	2 dokumen	60.000.000	49.503.000	(10.497.000)	Pemerintah	APBD
						Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan penilaian barang milik daerah SKPD	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan penilaian barang milik daerah SKPD	Makassar	Makassar	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	44.555.000	(5.445.000)	Pemerintah	APBD
						Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penyusunan barang milik daerah SKPD	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penyusunan barang milik daerah SKPD	Makassar	Makassar	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000		(5.000.000)	Pemerintah	APBD
						Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	Makassar	Makassar	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000	4.948.000	(52.000)	Pemerintah	APBD
						Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah (Rp)	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah (Rp)			Rp. 1.712.430.000	Rp. 1.712.430.000	268.530.000	180.815.000	(87.715.000)	Pemerintah	APBD
						Perencanaan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan perencanaan pengelolaan retribusi daerah	Perencanaan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan perencanaan pengelolaan retribusi daerah	Makassar	Makassar	1 laporan	1 laporan	5.000.000	5.000.000		Pemerintah	
						Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah kebijakan retribusi daerah yang disebarluaskan	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah kebijakan retribusi daerah yang disebarluaskan	Makassar	Makassar	1 laporan	1 laporan	116.155.000	78.420.000	(37.735.000)	Pemerintah	APBD
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan objek retribusi daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan objek retribusi daerah	Makassar	Makassar	1 laporan	1 laporan	142.375.000	97.395.000	(44.980.000)	Pemerintah	APBD
						Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan data retribusi daerah	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan data retribusi daerah	Makassar	Makassar	1 laporan	1 laporan	2.500.000		(2.500.000)	Pemerintah	APBD
						Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Makassar	Makassar	1 laporan	1 laporan	2.500.000		(2.500.000)	Pemerintah	APBD
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN			90	90	1.331.350.000	178.790.000	(1.152.560.000)	Pemerintah	APBD
						Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan	Makassar	Makassar	809 orang	809 orang	809.000.000		(809.000.000)	Pemerintah	APBD
							Jumlah pakaian lapangan yang diadakan		Jumlah pakaian lapangan yang diadakan			399 orang	399 orang				Pemerintah	
							Jumlah pakaian korpri yang diadakan		Jumlah pakaian korpri yang diadakan			809 orang	809 orang				Pemerintah	



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

Kode	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)		Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)		Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana			Kelompok sasaran	Sumber Dana
	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
						Jumlah pakaian batik khas daerah yang diadakan		Jumlah pakaian batik khas daerah yang diadakan		Jumlah pakaian batik khas daerah yang diadakan				809 orang	809 orang				Pemerintah	
						Jumlah pakaian olahraga dan perlengkapannya yang diadakan		Jumlah pakaian olahraga dan perlengkapannya yang diadakan		Jumlah pakaian olahraga dan perlengkapannya yang diadakan				809 orang	809 orang				Pemerintah	
						Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian		Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian		Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang diadakan		Makassar	Makassar	1 laporan	1 laporan	98.600.000	88.760.000	(9.840.000)	Pemerintah	APBD
						Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian		Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian		Jumlah laporan sistem informasi kepegawaian		Makassar	Makassar	1 laporan	1 laporan	5.000.000		(5.000.000)	Pemerintah	APBD
						Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai		Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai		Jumlah laporan hasil evaluasi penilaian kinerja pegawai		Makassar	Makassar	1 laporan	1 laporan	100.000.000	90.030.000	(9.970.000)	Pemerintah	APBD
						Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah aparat SKPD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		Makassar	Makassar	100 orang	100 orang	218.750.000		(218.750.000)	Pemerintah	APBD
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah sosialisasi peraturan Perundang-undangan		Makassar	Makassar	100 orang	100 orang	100.000.000		(100.000.000)	Pemerintah	APBD
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100%	100%	2.921.697.000	1.216.410.900	(1.705.286.100)	Pemerintah	APBD
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		Makassar	Makassar	26 unit	26 unit	240.000.000	30.000.000	(210.000.000)	Pemerintah	APBD
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia		Makassar	Makassar	300 unit	300 unit	815.450.000		(815.450.000)	Pemerintah	APBD
						Penyediaan peralatan rumah tangga		Penyediaan peralatan rumah tangga		Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia		Makassar	Makassar	10 jenis	10 jenis	50.000.000	20.000.000	(30.000.000)	Pemerintah	APBD
						Penyediaan bahan logistik kantor		Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah logistik yang tersedia		Makassar	Makassar	2 jenis	2 jenis	234.576.000	345.125.900	110.549.900	Pemerintah	APBD
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan		Makassar	Makassar	10 jenis	10 jenis	300.000.000	130.150.000	(169.850.000)	Pemerintah	APBD
						Fasilitasi kunjungan tamu		Fasilitasi kunjungan tamu		Jumlah fasilitasi kunjungan tamu		Makassar	Makassar	1 tahun	1 tahun	50.000.000	50.400.000	400.000	Pemerintah	APBD
						Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah perjalanan dinas		Makassar	Makassar	1 tahun	1 tahun	581.671.000	602.850.000	21.179.000	Pemerintah	APBD
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah arsip dinamis SKPD yang tertata		Makassar	Makassar	50 arsip	50 arsip	50.000.000	37.885.000	(12.115.000)	Pemerintah	APBD
						Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD		Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD		Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD yang tersedia		Makassar	Makassar	3 sistem	3 sistem	600.000.000		(600.000.000)	Pemerintah	APBD
						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%	100%	3.100.000.000	703.348.000	(2.396.652.000)	Pemerintah	APBD
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan		Makassar	Makassar	1 unit	1 unit	500.000.000		(500.000.000)	Pemerintah	APBD



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

Kode						Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Lokasi	Lokasi	Target Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana			Kelompok sasaran	Sumber Dana
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan operasional dinas	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan operasional dinas	Makassar	Makassar	1 unit	1 unit	500.000.000		(500.000.000)	Pemerintah	APBD
						Pengadaan mebel	Jumlah lemari arsip yang tersedia	Pengadaan mebel	Jumlah lemari arsip yang tersedia	Makassar	Makassar	60 unit	60 unit	450.000.000		(450.000.000)	Pemerintah	APBD
							Jumlah meja kerja pejabat eselon/staf yang tersedia		Jumlah meja kerja pejabat eselon/staf yang tersedia			100 unit	100 unit				Pemerintah	
							Jumlah kursi kerja pejabat eselon/staf yang tersedia		Jumlah kursi kerja pejabat eselon/staf yang tersedia			100 unit	100 unit				Pemerintah	
						Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Makassar	Makassar	1 unit	1 unit	1.500.000.000		(1.500.000.000)	Pemerintah	APBD
						Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	Makassar	8 unit	8 unit	100.000.000	628.348.000	528.348.000	Pemerintah	APBD
						Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	Makassar	8 unit	8 unit	50.000.000	75.000.000	25.000.000	Pemerintah	APBD
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	12.373.600.252	8.723.826.896	(3.649.773.356)	Pemerintah	APBD
						Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	Makassar	Makassar	1 tahun	1 tahun	5.000.000	4.992.000	(8.000)	Pemerintah	APBD
						Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbavarkan	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbavarkan	Makassar	Makassar	1 tahun	1 tahun	829.636.248	603.184.200	(226.452.048)	Pemerintah	APBD
						Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Makassar	Makassar	1 tahun	1 tahun	50.000.000	49.940.000	(60.000)	Pemerintah	APBD
						Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa tenaga non PNS	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa tenaga non PNS	Makassar	Makassar	369 orang	369 orang	11.488.964.004	8.065.710.696	(3.423.253.308)	Pemerintah	APBD
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik			100%	100%	1.309.951.505	1.120.512.000	(189.439.505)	Pemerintah	APBD
						Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Makassar	Makassar	1 unit	1 unit	80.000.000	107.160.000	27.160.000	Pemerintah	APBD
							Jumlah biaya pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan		Jumlah biaya pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan			1 unit	1 unit				Pemerintah	
							Jumlah pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan roda 4		Jumlah pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan roda 4			1 unit	1 unit				Pemerintah	



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

Kode							Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Bidang urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Lokasi	Lokasi	Target Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana			Kelompok sasaran	Sumber Dana
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan		
						Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Makassar	Makassar	43 unit	43 unit		755.056.000	728.352.000	(26.704.000)	Pemerintah	APBD
							Jumlah biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan			43 unit	43 unit					Pemerintah	
							Jumlah pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 4		Jumlah pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 4			39 unit	39 unit					Pemerintah	
							Jumlah pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 2		Jumlah pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 2			382 unit	382 unit					Pemerintah	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	Makassar	Makassar	10 unit	10 unit		30.000.000	70.000.000	40.000.000	Pemerintah	APBD
						Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang di pelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang di pelihara	Makassar	Makassar	5 unit	5 unit		20.000.000	10.000.000	(10.000.000)	Pemerintah	APBD
						Pemeliharaan/rehabilit asi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilit asi	Pemeliharaan/rehabili litasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Makassar	Makassar	25 unit	25 unit		199.895.505	105.000.000	(94.895.505)	Pemerintah	APBD
						Pemeliharaan/rehabilit asi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/rehabili litasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Makassar	Makassar	1 tahun	1 tahun		150.000.000	50.000.000	(100.000.000)	Pemerintah	APBD
						Pemeliharaan/rehabilit asi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/rehabili litasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Makassar	Makassar	1 tahun	1 tahun		75.000.000	50.000.000	(25.000.000)	Pemerintah	APBD
															157.348.496.831	155.681.166.506	(1.667.330.325)		



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada sasaran kinerja dan prioritas pembangunan sebagaimana tertuang pada RKPD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022. Rencana kerja tersebut menunjukkan kesesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD perubahan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022

- a. Pengendalian pelaksanaan pembangunan kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022.
- b. Penilaian akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah dan target kinerja sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022.

Untuk itu, dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah tersebut, dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Menyusun dokumen penganggaran sesuai dokumen perencanaan agar tercipta konsistensi dokumen
2. Melaksanakan rencana kerja perubahan tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing
3. Melakukan pengendalian dan pemantauan rencana kerja secara periodik (triwulan, semester)

5.2 Rencana tindak lanjut.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022, menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran perubahan (RKA dan DPA tahun 2021) dengan mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022.



Selain itu rencana kerja perubahan 2022 menjadi pedoman dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan.